D. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

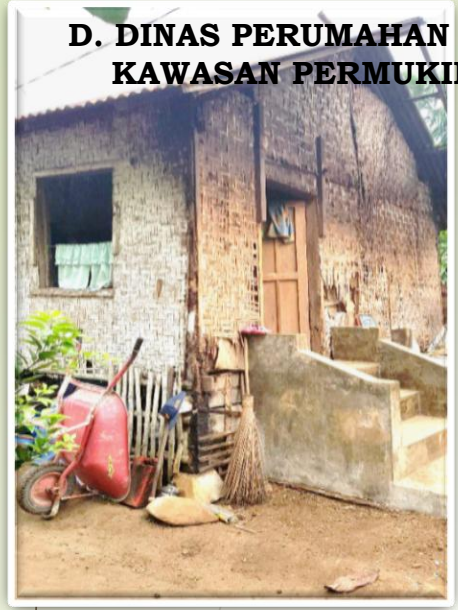

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah SWT agar disampaikan kepada Nabi kita, Muhammad SAW.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pimpinan PD menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD dan menetapkan Renstra PD setelah disesuaikan dengan RPJMD serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2025-2029 dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 yang telah mencurahkan segenap waktu dan fikirannya demi

tersusunnya Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025-2029 ini.

Payakumbuh, September 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

MARTA MINANDA, ST, MT

NIP. 197103031997011001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR GRAFIK..... vii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN I-6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
2.1 GAMBARAN PELAYANAN II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur II-1
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman II-4
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia II-5
2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perkantoran II-6
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-7
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan II-33
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-34
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah II-34
2.2.2 Isu Strategis II-36

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 TUJUAN DAN SASARAN III-1
3.2 STRATEGI III-3
3.3 ARAH KEBIJAKAN III-3

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN IV-1

4.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN IV-11
4.3 SUB KEGIATAN PRIORITAS PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH II-17
4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) IV-19
4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) IV-21
4.6 INDIKATOR KINERJA LANNYA ..... IV- 23

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 2.1	Komposisi Pegawai Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	II-5
TABEL 2.2	Kondisi Inventaris Kantor Tahun 2024	II-6
TABEL 2.3	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	II-8
TABEL 2.4	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	II-10
TABEL 2.5	Target dan Realisasi Penanganan RTLH Tahun 2017 s/d 2024	II-13
TABEL 2.6	Jumlah Rumah, Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Payakumbuh Tahun 2021-2024	II-14
TABEL 2.7	Jumlah Alokasi Bantuan Prasarana Sanitasi (Limbah Domestik) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2024	II-20
TABEL 2.8	Rekapitulasi Data Jumlah Perumahan Kota Payakumbuh Kondisi s/d Tahun 2024	II-23
TABEL 2.9	Tabel Rekapitulasi Data Perumahan Yang Telah Dilakukan Proses Serah Terima PSU Tahun 2019-2024	II-30
TABEL 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2023-2025	II-34
TABEL 3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2023-2025	III-2
TABEL 3.2	Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029	III-5
TABEL 4.1	Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	IV-12
TABEL 4.2	Sub Kegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-17
TABEL 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-20
TABEL 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-22
TABEL 4.5	Indikator Kinerja Lainnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-24

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh II-4
GAMBAR 2.2 Pelaksanaan Penanganan Rumah TidakLayak Huni (RTLH) Kota Payakumbuh..... II-16
GAMBAR 2.3 Tangkapan Layar Target Sasaran Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dalam RPJMN 2025-2029 ..... II-18
GAMBAR 2.4 Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Individu di Kota Payakumbuh II-21
GAMBAR 2.5 Tangkapan Layar Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 ..... II-43
GAMBAR 2.6 Tangkapan Layar Prioritas Pembangunan 6 RPJMN 2025-2029 terkait dengan hunian layak dan terjangkau II-44
GAMBAR 2.7 Tangkapan Layar Proyek Strategis Nasional Bidang Perumahan dan Permukiman pada RPJMN 2025-2029 ..... II-44

DAFTAR GRAFIK

Halaman

GRAFIK 2.1 Target dan Realisasi Penanganan RTLH Tahun 2017-2024 ..... II-14
GRAFIK 2.1 Data Jumlah, Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Payakumbuh Tahun 2021-2024 ..... II-15

BAB I
Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan pusat maupun regional sektor perumahan dan permukiman, yang berfungsi sebagai pedoman serta acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Kota Payakumbuh untuk tahun 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C, dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai

berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka untuk urusan Perumahan di Kota Payakumbuh dibentuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan perumahan akan mempunyai dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena ada *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Issue strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat). Sasarannya adalah meningkatkan penyediaan perumahan layak huni dengan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman yang memadai. Isu yang lain adalah pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, serta penanganan permukiman kumuh. Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar masyarakat di Kota Payakumbuh dapat menghuni rumah yang layak.

Dengan diterbitkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Sementara sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, Renstra Kementrian PUPR dan Renstra Dinas Perumahan dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Payakumbuh Tahun 2017 menyusun Rencana Strategis SKPD Tahun 2017-2022. Renstra ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 tahun guna mengoperasionalkan RPJMD telah disusun yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersifat indikatif, disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, tujuan dilaksanakan kegiatan, sasaran dan target dari kegiatan. Selanjutnya juga diamanatkan pada diktum keenam point b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum utama yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977) ;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan gender;
25. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 49);

Selain dari peraturan perundang-undangan di atas dalam penyusunan dokumen Renstra ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 20252029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan resmi bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, swasta dan masyarakat luas yang memuat program kegiatan pembangunan daerah dalam pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Payakumbuh untuk 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk memudahkan seluruh aparatur serta masyarakat dan instansi terkait dalam memahami dan menilai program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh lima tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah:

a. Sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai srategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
b. Sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Perangkat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Payakumbuh.
c. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban sekaligus evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Menjelaskan tentang gambaran pelayanan perangkat daerah yang memuat paling sedikit tugas pokok, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksi), kelompok sasaran layanan serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB II TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

Berisikan tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, serta Startegi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menggambarkan uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif serta target kebrhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebagai perangkat daerah di Kota Payakumbuh yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus mengacu pada beberapa indikator dan parameter pelayanan kinerja yang tercantum dalam IKU PD. Pengukuran kinerja pelayanan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan dimaksud, yang ditetapkan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja, berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 49 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan seksi pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi :

1) Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2) Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
4) Pengoordinasian urusan umum kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
5) Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas;
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perumahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perumahan;
2) Penyelenggaran kegiatan Bidang Perumahan;
3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan;
4) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan;
5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

d. Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman

Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
2) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;

4) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti pada Gambar 1.1 berikut ini:

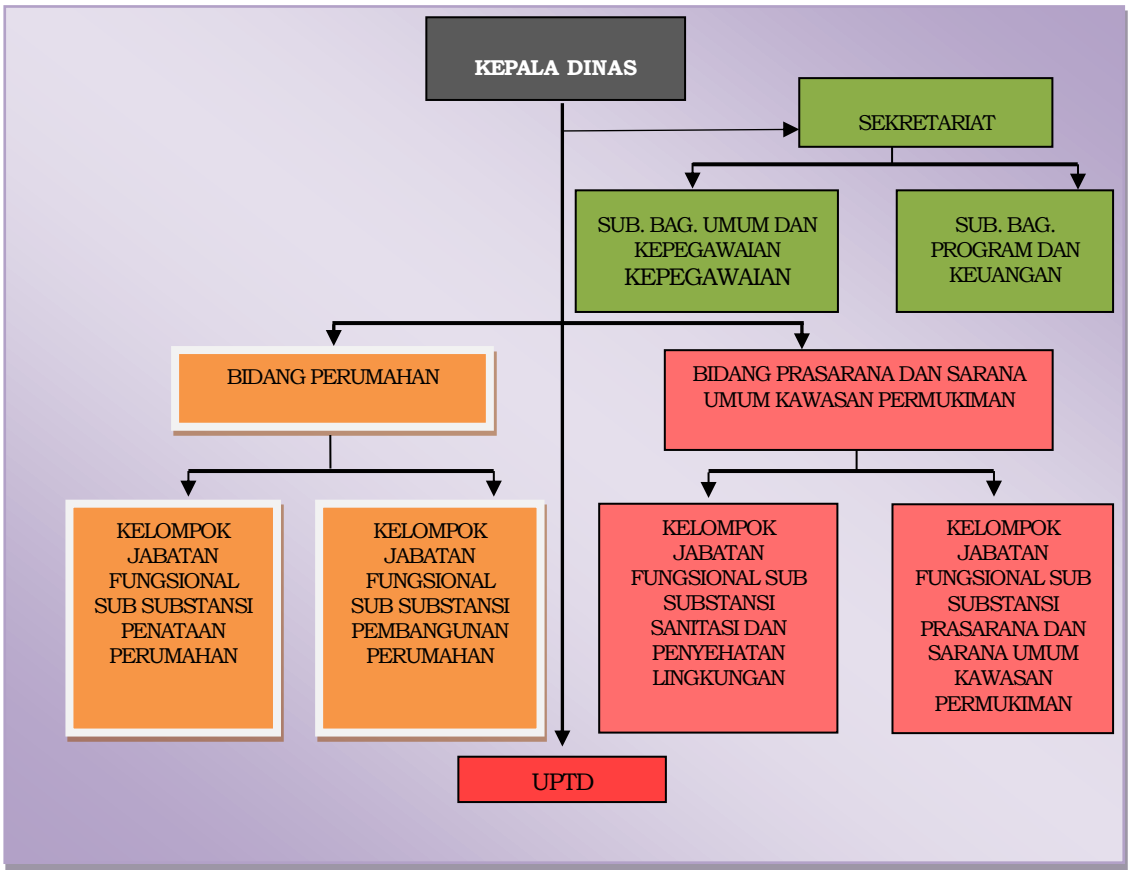

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi kemampuan sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh saat ini.

2.1.2.1Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pegawai yang bertugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh pada tahun 2024 berjumlah 56 orang yang terdiri dari 30 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta 26 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian seperti tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh
Pada Tahun 2024

Pendidikan	ASN		Non ANS		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
S2	5	1	-		6
S1	8	11	6	3	28
D3	1	1	1		3
SLTA	3	0	14	2	19
TOTAL	**17**	**13**	**21**	**5**	**56**

Sumber: Bezeting Dinas PKP 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi kualifikasi tingkat pendidikan pegawai khusus ASN (PNS dan PPPK) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari pegawai yang berpendidikan dasar sampai menengah (SD s.d. SLTA) hanya sebanyak 10,00 %, sementara pegawai dengan pendidikan tinggi (diploma, sarjana dan pasca-sarjana) sebesar 90,00

%. Hal ini menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia khusus ASN pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah cukup mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kondisi prasarana dan sarana yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan kondisi tahun 2024 secara garis besar dapat diuraikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Kondisi Inventaris Kantor Tahun 2024

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1	Tanah	2	0	0	2
1	Peralatan Kantor				
	a. Meja & Kursi	110	20	10	140
	b. Lemari	7	3	2	12
	c. Brankas	1	0	0	1
	d. Laptop	13	0	1	14
	e. Komputer	8	1	4	13
	f. Printer	18	1	7	26
	g. Finger Print	0	0	1	1
	h. Filling Cabinet	0	2	4	6
	i. Generator Set	0	1	0	1
	j. Pendingin Ruangan (AC)	7	0	1	8
	k. UPS	10	0	3	13
	l. Televisi	2	0	0	2
	m. Mesin Tik	2	0	2	4
	n. Camera Digital	4	0	0	4
	o. Wireless	2	0	0	2
	p. Sound System	1	0	0	1
	q. CCTV	1	0	0	1
	r. In focus/LCD Proyektor	2	0	1	3
	s. Layar Screen View/Tripot	3	0	0	3
	t.GPS	1	0	0	1
	u. Scanner	1	0	0	1
	v. Pompa Air	1	0	0	1
	w. Karpet	1	0	0	1
	x. Tangga	1	0	0	1
2	Bangunan				
	a. Gedung Kantor	2	0	0	2
	b. Gedung Labor IPLT	1	0	0	1
	c. Rumah Jaga IPLT	1	0	0	1
3	Kendaraan Bermotor				
	a. Sepeda Motor	10	7	1	18
	b. Minibus	4	0	0	4
	c. Pick-up	1	0	0	1
	d. Truck Tangki Tinja	4	1	0	5

Sumber: KIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2024

Data di atas menunjukkan bahwa sumber daya sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

tahun 2024 sudah dapat dikategorikan sudah terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas harian kedinasan

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu: 1). Persentase Rumah Layak Huni, 2). Persentase Rumah Tangga Yang memiliki pengolahan air limbah akses aman, 3). Persentase penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah. Berbeda dengan target kinerja yang yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dimana untuk pemenuhan sarana sanitasi pengukuran kinerjanya adalah baru pada tahap akses layak, sedangkan untuk IKU pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 pengukurannya ditingkatkan menjadi akses aman. Capaian dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan periode renstra dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah s.d Tahun 2022

No	Indikator	SPM /Standar	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Persentase Rumah Layak Huni		√	√	%	91,70	92,95	93,81	94,87	95,74	96,27	91,90	92,98	94,22	95,26	95,85	95,95	
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak		√	√	%	88,20	89,71	91,22	92,74	96,97	98,18	89,78	91,47	93,23	95,98	96,92	98,91	
3	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang.		√	√	%	0,00	0,00	1,96	3,92	16,66	18,62	0,00	0,00	14,70	14,70	20,59	26,47	

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dan LKJIP tahun 2023

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra cenderung dapat direaslisasikan dengan baik. Hal ini disebabkan tingginya komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang baik di Kota Payakumbuh. Dengan seluruh sumber daya yang ada termasuk dalam pengalokasian anggaran serta adanya sumber pembiayaan non APBD yang ada, seperti adanya Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN untuk sektor perbaikan rumah tidak layak huni dan juga sumber pendanaan lain berupa program nasional Hibah Air Limbah Setempat (HALS) berupa bantuan pembangunan tanki septik individu, maka seluruh target kinerja dapat dicapai dengan baik.

Untuk tahun anggaran 2023-2026, dengan adanya kebijakan pemilu serentak di Indonesia dan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota di Indonesia yang masuk kategori dalam intruksi tersebut juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD dan diikuti juga oleh perangkat daerah dengan menyusun rencana strategis (renstra) dengan periode yang sama yaitu tahun 2023-2026.

Dalam proses penyusunannya dan setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sampai dengan kondisi akhir tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dilakukan sedikit perubahan indikator. Perubahan indikator kinerja dimaksud adalah pada item indikator kinerja pemenuhan sarana sanitasi yang pada periode renstra 2017-2022 adalah sampai dengan kondisi layak, untuk periode renstra 2023-2026 ditingkatkan menjadi pemenuhan sarana sanitasi akses aman. Adapun target dan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan kondisi akhir 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah s.d Tahun 2024

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Rumah Layak Huni		√	√	%	96,95	97,24	97,53	97,81	97,04	97,30	0,00	0,00	
2	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman		√	√	%	22,55	23,98	25,41	26,84	21,73	22,87	0,00	0,00	
3	Persentase penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah.		√	√	%	19,75	22,93	26,11	29,30	21,02	24,20	0,00	0,00	

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 dan LKJIP Tahun 2024

Dari tabel diperoleh informasi bahwa indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman belum tercapai sesuai dengan yang telah ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun renstra cukup tinggi, dimana diasumsikan pembangunan tangki septik individu sebagai perwujudan pendukung dari kinerja ini dapat terlaksana dengan target 500 unit untuk setiap tahunnya, akan tetapi penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah dan pusat, pembangunan tangki septik individu hanya dapat dilaksanakan rata-rata 300 unit pertahun, sedangkan untuk indikator kinerja lainnya dapat terpenuhi dengan baik.

Rincian masing-masing kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakayat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sesuai dengan kewenangannya seperti yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2036 adalah meliputi peningkatan penyediaan rumah layak huni, pemenuhan rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman serta meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman berkelanjutan dengan fasilitasi penyerahan PSU dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh dapat digambarkan pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Peningkatan Penyediaan Rumah Layak Huni

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu keadaan ke keadaan lainnya yang dinilai lebih baik. Adapun wujud kebijakan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan suatu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 28H UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak berkehidupan sejahtera dimana salah satunya diukur dengan sehat secara lahir dan bathin, dengan mempunyai sebuah tempat hunian yang layak, tentunya memberikan pengakuan sosial dengan status yang diakui dan memberikan peluang serta kesempatan terhadap peningkatan program kesejahteraan, selain itu juga mampu memberikan kesempatan peluang usaha bagi orang yang membutuhkan hunian yang layak.

Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Berhak Menempati Rumah Yang Layak Huni, hal ini adalah merupakan manivestasi dari regulasi

terkait dengan perumahan yang telah driumuskan di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) mengatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Beranjak dari sini, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) juga menegaskan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah". Selanjutnya pemerintah mempertegas bahwa urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Payakumbuh. Peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni ini dilaksanakan dengan metoda pemberian stimulan bagi masyarakat untuk dilakukan perbaikan rumah mereka dan dikenal dengan istilah Peningkatan Kualitas (PK) serta dengan metode Pembangunan Baru (PB) bagi masyarakat yang rumah mereka tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas. Dalam hal peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota adalah berupa dana stimulan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal sangat dibutuhkan swadaya dari masyrakat tersebut baik dari sisi pendanaan maupun tenaga kerja yang dibutuhkan.

Pelaksanaan intervensi terhadap rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Kota Payakumbuh, efektifnya dilakukan sejak tahun 2017 yaitu sejak berdirinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh. Adapun rekapitulasi pelaksanaan intervensi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di Kota Payakumbuh tahun 2017-2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 dan grafik 2.1 berikut:

Tabel 2.5

Target dan Realisasi Penanganan RTLH Tahun 2017 s/d 2024

NO	Tahun	Penanganan RTLH (Unit)	
		Target	Realisasi
	(1)	*(2)*	*(3)*
1	2017	300	357
2	2018	300	309
3	2019	300	350
4	2020	300	296
5	2021	250	169
6	2022	150	27
7	2023	100	121
8	2024	100	90
Jumlah		**1800**	**1719**

Sumber: Hasil Olahan Data tahun 2024

Dari tabel dan grafik di atas terlihat jelas, pelaksanaan intervensi terhadap rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh adalah *fluktuatif*. Hal ini sangat tergantung dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan pusat. Terjadi penurunan *trend* dari realisasi penanganan RTLH dari tahun 2017 – 2024. Pada tahun awal pelaksanaan intervensi RTLH, Kota Payakumbuh memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan sehingga volume untuk pelaksanaan intervensi RTLH ini dapat lebih ditingkatkan. Sejak tahun 2021, adanya kebijakan pemerintah pusat dimana Kota Payakumbuh tidak lagi memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan sangat berpengaruh terhadap volume intervensi yang dapat dilaksanakan. *Trend* pelaksanaan intervensi terhadap rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

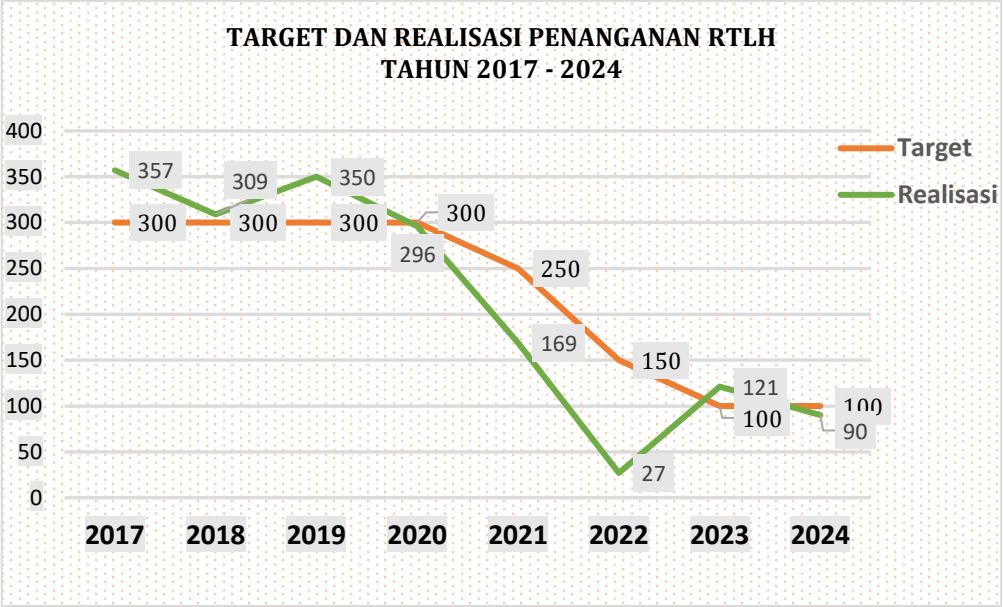

Grafik 2.1: Target dan Realisasi Penanganan RTLH Tahun 2017-2024

Dalam perkembangannya, pergerakan jumlah rumah termasuk diantaranya jumlah rumah layak huni serta rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Payakumbuh sampai dengan kondisi tahun 2021- 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 dan grafik berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Rumah, Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Payakumbuh Tahun 2021-2024

NO	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Jumlah Rumah	34967	35501	36161	36493
2	Rumah Layak Huni	33787	34348	35129	35551
3	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1180	1153	1032	942
4	% Rumah Layak Huni	96,63%	96,75%	97,15%	97,42%
5	% Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3,37%	3,25%	2,85%	2,58%

Sumber: Hasil olahan data tahun 2024

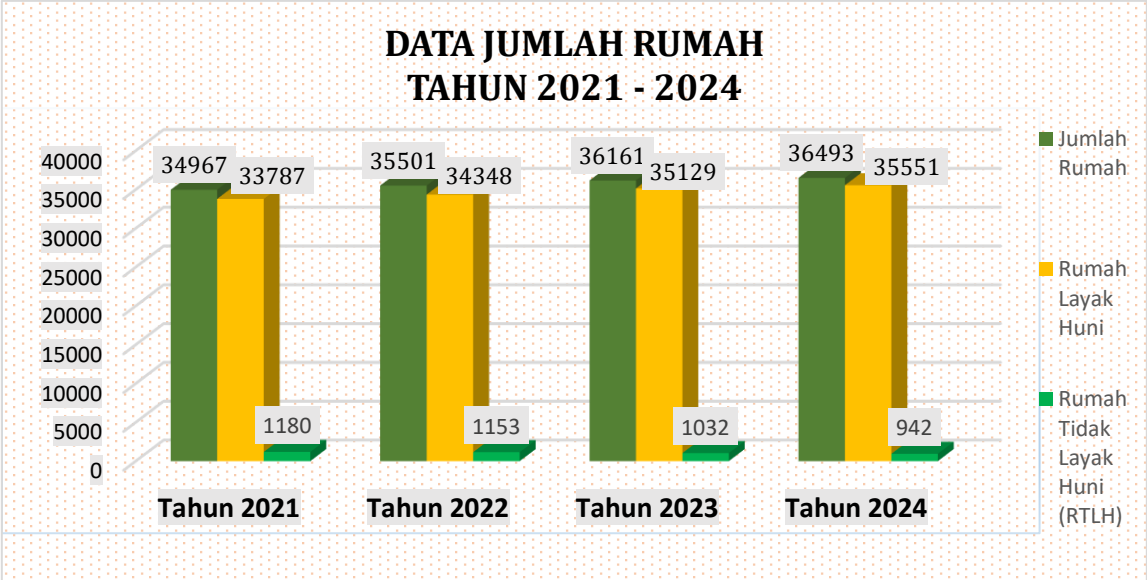

Grafik 2.2: Data Jumlah, Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Payakumbuh Tahun 2021-2024

Dari tabel dan grafik diatas, terjadi pergerakan jumlah jumlah rumah, rumah layak huni dan rumah tidak layak huni (RTLH) selang waktu 2021-2024 di Kota Payakumbuh. Terjadinya pergerakan masing-masing angka ini karena adanya penambahan jumlah rumah baik itu yang dibangun pengembang ataupun oleh masyarakat secara swadaya. Sedangkan untuk data rumah layak huni dan rumah tidak layak huni (RTLH) pergerakan angkanya disebabkan adanya intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan adanya rehabilitasi dan pembangunan baru rumah layak huni. Dari tabel dan grafik di atas diperoleh informasi masih terdapat ± 942 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Payakumbuh, yang dihitung penurunannya sejak awal tahun renstra 2023-2026, dimana sesuai dengan pendataan bahwa diawal tahun renstra ini diperoleh angka jumlah rumah tidak layak huni adalah ± 1.180 unit.

Adapun beberapa dokumentasi peningkatab kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Payakumbuh tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Pelaksanaan Penanganan Rumah TidakLayak Huni (RTLH) Kota Payakumbuh

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman dimana urusan ini adalah merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar sesuai dengan yang di amanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan pelindung masyarakat
6. Sosial

Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib terkait pelayanan dasar ini wajib mengukur ketercapaian pelayanannya dengan suatu standar yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah ketentuan tentang jenis,mutu pelayanan dasar serta penerima pelayanan SPM bidang Perumahan Rakyat ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat adalah jenis pelayanan publik bidang Perumahan Rakyat yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pelayanan dasar tersebut terdiri dari beberapa indikator yang menjadi tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang wajib dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil serta manfaat pelayanan dasar tersebut.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yang terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar:

a. Penyedian & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam:
    a) Rehabilitasi rumah;
    b) Pembangunan kembali rumah;
    c) Relokasi rumah;
    d) Bantuan sewa rumah.
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota/kabupaten:
    a) Fasilitasi Ganti aset;

b) Subsidi uang sewa;

c) Penyediaan rumah layak huni.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Payakumbuh untuk tahun 2024 menargetkan pencapaian SPM adalah 9 unit rumah dengan jenis pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana alam. Untuk jenis pelayanan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota /kabupaten Kota Payakumbuh belum dianggarkan karena tidak memiliki program pemerintah yang mengakibatkan terjadinya relokasi rumah masyarakat.

b. Pemenuhan Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman

Salah satu sasaran dari tujuan pembangunan berkelanjutaan atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi. Untuk mendukung pencapaian SDGs bidang sanitasi, RPJMN 2019-2024 mengamanatkan pencapaian target akses sanitasi layak sebesar 90% termasuk 15% akses aman untuk air limbah domestik. Sedangkan dalam RPJMN 2025-2029 diperoleh bahwa target untuk rumah tangga dengan akses sanitasi aman untuk tahun 2025 adalah 12,5% dan 30% untuk tahun 2029 sebagai akhir periode RPJMN dengan rincian sesuai dengan gambar tangkapan layar berikut:

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)[b]	10,21 (2023)	12,5	30

Gambar 2.3
Tangkapan Layar Target Sasaran Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dalam RPJMN 2025-2029

Sampai dengan kondisi akhir tahun 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga senantiasa berupaya untuk mewujudkan target nasional tersebut.

Terdapat sedikit peningkatan target kualitas dalam hal pengelolaan limbah domestik di indonesia, yang semula adalah ditargetkan akses layak kemudian ditingkatkan menjadi akses aman. Pengelolaan limbah domestik akses layak dapat dikategorikan bahwa masyarakat sudah memiliki akses pengolahan air limbah domestik menggunakan tangki septik individu dan layak secara teknis. Sedangkan untuk akses aman adalah dimana masyarakat sudah memiliki sarana pengolahan limbah domestik berupa tangki septik individu yang layak secara teknis dan dilakukan penyedotan sekali 3-5 tahun dan dilakukan pengolahan pada instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Sampai dengan kondisi akhir tahun 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan berbagai upaya dalam mewujudkan peningkatan rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan pembangunan tangki septik individu, pembangunan septik tank komunal dan pembangunan MCK+, memberikan pelayanan sedot tinja kepada masyarakat dan pengoperasional-an instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) sebagai muara terakhir pengelolaan limbah domestik sebelum dapat di buang ke media lingkungan.

Adapun rincian kegiatan pembangunan sarana sanitasi air limbah domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 -2024 adalah sebagai yang tercantum dalam tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7

Jumlah Alokasi Bantuan Prasarana Sanitasi (Limbah Domestik)
Kota Payakumbuh Tahun 2017-2024

No	Kecamatan	Tahun	Jumlah Bantuan Prasaraba Sanitasi (Unit)					Total KK Terlayani	Keterangan
			Tangki Septik Individu			Tangki Septi Komunal (SR 5-10)	MCK+		
			DAK	HALS/APBD	Jumlah Tangki Septik	DAK	APBD/DAK		
1	Payakumbuh Barat	2017	137	116	253	-	1	283	MCK = 20 KK
		2018	-	25	25	5	-	71	5 TS SR = 26 KK
		2019	281	122	403	-	-	403	
		2020	66	-	66	-	-	66	
		2021	-	93	93	-	-	93	
		2022		181	181			181	
		2023		44	44			44	
		2024		61	61			61	
		Jumlah	**484**	**642**	**1126**	**5**	**1**	**1202**	
2	Payakumbuh Timur	2017	69	53	122	-	-	122	
		2018	-	79	79	-	1	99	MCK = 20 KK
		2019	-	71	71	-	-	71	
		2020	125	52	177	-	-	177	
		2021	-	73	73	-	-	73	
		2022							
		2023		14	14			14	
		2024		132	132			132	
		Jumlah	**194**	**474**	**668**	**0**	**1**	**688**	
3	Payakumbuh Utara	2017	69	94	163	-	2	263	MCK = 30 KK
		2018	-	22	22	15	1	141	MCK = 20 KK TS = 99
		2019	-	-	-	-	-	0	
		2020	193	54	247	-	-	247	
		2021	60	36	96	-	-	96	
		2022		59	59			59	
		2023		113	113			113	
		2024		84	84			84	
		Jumlah	**322**	**462**	**784**	**15**	**3**	**1003**	
4	Payakumbuh Selatan	2017	68	-	68	-	1	68	
		2018	-	54	54	-	-	74	MCK = 20 KK
		2019	-	-	-	-	-	0	
		2020	-	39	39	-	-	39	
		2021	122	68	190	-	-	190	
		2022		118	118			118	
		2023		70	70			70	
		2024		52	52			52	
		Jumlah	**190**	**401**	**591**	**0**	**1**	**611**	
5	Lamposi Tigo Nagori	2017	138	42	180	-	2	240	MCK = 30 KK
		2018	-	116	116	10	-	174	TE SR = 58 KK
		2019	-	107	107	-	-	107	
		2020	126	55	181	-	-	181	
		2021	60	30	90	-	-	90	
		2022							
		2023		59	59			59	
		2024		62	62			62	
		Jumlah	**324**	**471**	**795**	**10**	**2**	**913**	
	Jumlah Total s/d 2021		**1514**	**2450**	**3964**	**30**	**8**	**4417**	

Sumber: Hasil olahan data tahun 2024

Dari tabel diatas, terlihat bahwa intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh menuju peningkatan rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman adalah didominasi oleh pembangunan sarana tangki septik individu. Sedangkan untuk sarana seperti tangki septik komunal dan mck+ lima tahun terakhir sudah tidak dilaksanakan lagi mengingat sulitnya dilakukan pengelolaan paska konstruksi dari infrastruktur ini. Tingginya angka pembangunan tangki septik individu ini setiap tahunnya tidak terlepas dari adanya program pemerintah pusat melalui kementerian keuangan republik indonesia dengan program Hibah Air Limbah Setempat (HALS), dimana Kota Payakumbuh menjadi salah satu kota di indonesia yang setiap tahunnya memperoleh alokasi program ini sampai

dengan tahun 2024. Beberapa contoh pelaksanaan pembangunan tangki septik individu untuk mendukung pencapaian rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4
Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Tangki Septik Individu
di Kota Payakumbuh

Terkait dengan pengelolaan air limbah domestik ini, dikarenakan kegiatan ini sesuai dengan regulasi yang ada merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar maka capaian kegiatan ini juga diukur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor: 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu; a). Pemenuhan Kebutuhan pokok air

minum sehari-hari, **b). Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.**

SPM Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik diukur dari :

A. Mutu kuantitas, dimana setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik

B. Mutu kualitas diukur dari :

- Pelayanan akses aman bagi masyarakat merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim diwilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 jiwa perhektar dan atau diseluruh wilayah perkotaan denagn bangunan atas dilengkapi dengan kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala serta dibuang dan diolah di IPLT.
- Pelayanan akses layak merupakan fasilitasi buang air besar bagi masyarakat yang bermukim diwilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 jiwa perhektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa danb bangunan bawah merupakan lubang tanah atau cubluk kembar.

Untuk tahun 2024, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dialaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (untuk kegiatan pengelolaan limbah domestik) diperoleh capaian persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah domestik akses aman di Kota Payakumbuh adalah sebasar 22,87%. Realisasi untuk pelayanan dasar ini sudah sangat baik mengingat target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam RPJMN 2019-2024 sebesar 15%.

c. Fasilitasi penyerahan PSU dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh

Penyerahan PSU Perumahan oleh pengembang adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan menjadi tanggung jawab pengelolaan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penyerahan PSU diharapkan dapat menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada kawasan perumahan. Hal ini seperti yang dijelaskan pada pasal 26 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan telah diterjemahkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan merumuskan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman. Dan selanjutnya teknis pelaksanaan dari perda ini disusun pula Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 31 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman.

Berdasarkan hasil inventarisasi jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer maupun perorangan sampai dengan kondisi akhir tahun 2024, jumlah perumahan di Kota Payakumbuh semula pada pendataan akhir tahun 2022 sebanyak 157 perumahan mengalami penambahan menjadi 174 perumahan pada akhir 2024. Berikut rekapitulasi data jumlah perumahan di kelurahan dalam kota Payakumbuh pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8

Rekapitulasi Data Jumlah Perumahan Kota Payakumbuh
Kondisi s/d Tahun 2024

NO	DEVELOPER	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI KELURAHAN	JUMLAH UNIT	TAHUN DIBANGUN
Payakumbuh Selatan						
1	PT. Densiko Particont	1	Griya Talago Permata	Sawahpadang Auakuniang	125	2004
2	PT. Irawati Palano Jaya	2	Palano 4	Sawahpadang Auakuniang	28	2018
3	PT. Irawati Palano Jaya	3	Limbukan Indah	Limbukan	50	2017
4	PT. Irawati Palano Jaya	4	Palano 5	Padang Karambia	26	2019
5	PT. Samala Corda Mandiri	5	Bumi Ngalau Indah	Balai Panjang	47	1994
6	PT. Samala Corda Mandiri	6	Bumi Ngalau Indah Tahap II	Balai Panjang	35	2019
7	Khairuddin Yusuf	7	Safir Residence	Kapalo Koto Ampangan	42	2015
8	Perum Perumnas	8	Perumnas Kubang Gajah	Limbukan	411	1986
9	PT. Mutiara Karina	9	Taman Mutiara	Balai Panjang	44	2001
10	PT. Mavi Andara Group	10	Delta Emprio	Limbukan	17	2018
11	PT. Rapizon Insan Cipta	11	Padang Karambia Sejahtera	Kototuo Limokampuang	59	2013

NO	DEVELOPER	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI KELURAHAN	JUMLAH UNIT	TAHUN DIBANGUN
12	PT. Muda Madani Indonesia	12	Sultan Madani Residence	Sawah Padang Aua Kuniang	76	2021
13	PT. Cahaya Amal Taqwa	13	D' Talago Green View	Sawahpadang Auakuniang	109	2020
14	PT. Alzaqi Diamond Utama	14	Pondok Pusako Indah	Balai Panjang	6	2021
15	PT. Bonai	15	Tanjung Guna Mutiara	Kototuo Limokampuang	76	2021
Payakumbuh Timur						
16	PT. Samala Corda Mandiri	1	Bumi Tiakar Indah	Padang Tangah Payobadar	126	1994
17	PT. Samala Corda Mandiri	2	Padang Tangah Indah	Padang Tangah Payobadar	33	1997
18	Hendrisyah	3	Cikasimi Tiakar	Tiakar	8	2014
19	Hendrisyah	4	Cikasimi	Payobasung	14	2015
20	Hendrisyah	5	Komplek Cikasimi II	Koto Baru	11	2014
21	Patra Doma	6	Payobasung Asri 1	Payobasung	21	2015
22	Patra Doma	7	Griya Tiakar Nan Indah	Payobasung	36	2010
23	PT. Mandevilla	8	Kedoya Green Tiakar 1	Tiakar	56	2017
24	PT. Mandevilla	9	Kedoya Green Tiakar 2	Tiakar	77	2017
25	PT. Mandevilla	10	Shavilla Tiakar	Tiakar	63	2019
26	PT. Mandevilla	11	Shavilla Tiakar Tahap 2	Tiakar	18	2023
27	PT. Mandevilla	12	Kedoya Green Tiakar 3	Tiakar	50	2019
28	PT. Mandevilla	13	Kedoya Green Tiakar 4	Tiakar	71	2022
29	Ambarwati	14	Arya Darussalam	Padang Tangah Payobadar	66	2012
30	Yul	15	Amanah Indah Residence	Padang Tiakar	13	2014
31	Eriyanto	16	Sicincin Permai	Sicincin	35	2011
32	Nof	17	Griya Sicincin	Sicincin	54	2017
33	Arina	18	Residence Ziluchi	Tiakar	26	2018
34	Azhardi	19	Minimalis Tiakar	Tiakar	8	2011
35	PT. Jos Mubarak Anugerah	20	Payobasung Regency I	Payobasung	21	2016
36	PT. Jos Mubarak Anugerah	21	Payobasung Regency II Tahap A	Payobasung	8	2023
37	PT. Jos Mubarak Anugerah	22	Payobasung Regency II Tahap B	Payobasung	11	2023
38	PT. Jos Mubarak Anugerah	23	Green Mubarak	Payobasung	14	2010
39	PT. Jos Mubarak Anugerah	24	Payobasung Asri 2	Payobasung	30	2016
40	PT. Jos Mubarak Anugerah	25	Yosrizal/Perumahan Lia	Koto Baru	13	2014

NO	DEVELOPER	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI KELURAHAN	JUMLAH UNIT	TAHUN DIBANGUN
41	PT. Jras Nofaren Prima	26	Balai Nan Tuo Permai	Tiakar	54	2019
42	Gusti Nurul	27	Perumahan Payobada	Sicincin	6	2012
43	PT. WahanaTirta Harau	28	Wahana Tiakar Residence	Tiakar	18	2018
44	PT. Jras Nofaren Prima	29	Villa Taman Barum Indah	Tiakar	267	2021
45	PT. Jean Jaya Utama	30	Griya Jean Tiakar Islami	Tiakar	44	2021
46	PT. Ekajaya Surya Gemilang	31	Ekajaya Permata	Sicincin	23	2020
47	PT. Ekajaya Surya Gemilang	32	Ekajaya Permata Residence	Sicincin	39	2021
48	PT. Ekajaya Surya Gemilang	33	Cemara Ekajaya	Sicincin	26	2021
49	PT. Samudramadani Andalas	34	Griya Limpato Hill	Balai Jaring	27	2021
50	Edo Maulana	35	Catur Cendana	Padang Tiakar	7	2021
51	PT. Bonai	36	Villa Mustika	Sicincin	55	2019
52	Zulkifli	37	Residence Ziluchi Tahap 2	Tiakar	21	2021
53	Budi	38	Graha Muslim Bina Mandiri	Tiakar	12	2015
54	Arina	39	Residence Ziluchi	Tiakar	26	2018
55	Firdaus	40	Perumahan Kubu Gadang Residence	Tiakar	9	2020
56	Sari Amelia	41	Rangkayo Residence	Tiakar	31	2021
57	PT. Jras Nofaren Prima	42	Villa Taman Barum Indah (komersil)	Tiakar	25	2023
58	PT. Rejasha Cipta Development	43	Bumi Rejasha Tiakar	Tiakar	32	2023
Payakumbuh Barat						
59	PT. Irawati Palano Jaya	1	Palano Residence	Talang	20	2013
60	PT. Irawati Palano Jaya	2	Palano 2	Talang	53	2017
61	Dt. Teddy	3	Griya Padang Somuk	Talang	74	2011
62	PT. Sarah Yahya	4	Satria Permai	Bulakan Balai Kandi	14	1998
63	Hendrisyah	5	Cikasimi	Bulakan Balai Kandi	7	2018
64	Hendrisyah	6	Cikasimi	Padang Tinggi Piliang	12	2018
65	Hendrisyah	7	Cikasimi Talang	Talang	19	2015
66	Patra Doma	8	Komplek Dua Grup	Bulakan Balai Kandi	9	2012
67	PT. Ziko Eka Perdana	9	Payolansek Indah 1	Payolansek	14	2015
68	PT. Ziko Eka Perdana	10	Payolansek Indah 2	Payolansek	11	2016
69	PT. Ziko Eka Perdana	11	Bumi Muslim	Ibuh	13	2015

NO	DEVELOPER	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI KELURAHAN	JUMLAH UNIT	TAHUN DIBANGUN
70	PT. Ziko Eka Perdana	12	Pulai Indah	Talang	50	2013
71	PT. Pembangunan Sumbar	13	Wisma Indah	Bulakan Balai Kandi	50	1984
72	PT. Mandevilla	14	Cemara Tropika	Payolansek	10	2014
73	PT. Mandevilla	15	Dahlia Town House	Padang Tinggi Piliang	9	2013
74	PT. Mandevilla	16	Univilla Regency	Talang	36	2019
75	PT. Mandevilla	17	Univilla Regency 2	Talang	32	2021
76	Tidak Diketahui	18	Kopo Indah	Bulakan Balai Kandi	20	1995
77	Tidak Diketahui	19	Balai Nan Duo Residence	Padangtongah Balai Nanduo	51	1995
78	Indra Makmur	20	Taman Firdaus	Payolansek	10	2015
79	Indra Makmur	21	Payolansek Reseidence I	Payolansek	9	2013
80	Indra Makmur	22	Payolansek Reseidence II	Payolansek	8	2013
81	Indra Makmur	23	Talang Indah	Talang	109	1993
82	Sisweri	24	Ranah Muslim	Payolansek	17	2015
83	Sisweri	25	Griya Nuansa Mandiri 2	Padang Tinggi Piliang	16	2013
84	Sisweri	26	Griya Nuansa Mandiri 1	Padangdata Tanahmati	15	2011
85	Sisweri	27	Griya Nuansa Mandiri 3	Padangdata Tanahmati	6	2013
86	PT. Nofaren Kemala Barokah	28	Samara Residence Exclusive	Payolansek	11	2023
87	PT. Densiko Particont	29	Palans Griya Permai	Payolansek	33	1997
88	PT. Densiko Particont	30	Bonai Indah	Koto Tangah	103	1996
89	PT. Densiko Particont	31	Chedoh Griya Indah	Koto Tangah	56	2002
90	Wendra Yunaldi	32	Grand Sahati	Payolansek	48	2014
91	Wendra Yunaldi	33	Griya Piliang Asri	Padang Tinggi Piliang	72	2007
92	Wendra Yunaldi	34	Sahati I	Padang Tinggi Piliang	25	2008
93	Wendra Yunaldi	35	Sahati 2	Subarang Batuang	38	2010
94	Wendra Yunaldi	36	Sahati Residence	Subarang Batuang	63	2013
95	M. Iqbal	37	Perumahan Kemuning	Payolansek	34	2003
96	Incorba	38	Anggrek Putih	Payolansek	42	1985
97	Muskar	39	Pakan Sinayan Residence	Pakan Sinayan	14	2013
98	H. Novitra	40	Griya Asri	Pakan Sinayan	74	2006
99	Horizon	41	Perumahan Piliang Permai	Padang Tinggi Piliang	7	2012

NO	DEVELOPER	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI KELURAHAN	JUMLAH UNIT	TAHUN DIBANGUN
100	Imelda Endah	42	Hunian Minang Asri	Padang Tinggi Piliang	8	2015
101	Rahmad	43	Sungai Pinago Resident	Tanjuanggodang Sungaipinago	6	2016
102	H. Dani Yusuf	44	Pauh Asri Residence	Tanjung Pauh	12	2014
103	Pak Murti	45	Graha Kencana	Tanjung Pauh	40	2018
104	Rizal	46	Mega Permai	Tanjung Pauh	166	1996
105	Ridwan, SH	47	Panorama Alam Indah Regency	Tanjung Pauh	121	2010
106	Ambarwati	48	Grand Arya Muslim I	Ibuh	6	2013
107	Ambarwati	49	Grand Arya Muslim II	Ibuh	26	2014
108	CV. Kamisato	50	Perumnas Ibuh	Ibuh	36	1994
109	Ramli. S	51	Perum Belakang Puskesmas	Ibuh	10	2007
110	Nelfi	52	Dalimo Residence	Ibuh	11	2009
111	H. Rusdi	53	Ngalau Indah View	Kubu Gadang	32	2008
112	PT. Rejasha Cipta Development	54	Bumi Rejasha Talang	Talang	31	2023
113	Elfido Guska	55	Pido Asri I	Koto Tangah	36	2007
114	Elfido Guska	56	Pido Asri II	Koto Tangah	40	2012
115	Dra. Hj. Susilawaty	57	Rasidah Residence	Koto Tangah	13	2016
116	Hambali	58	Griya Nadima	Padangdata Tanahmati	39	2011
117	PT. Sumatra Insan Prima	59	Abu Raihan View	Subarang Batuang	37	2017
118	PT. Sumatra Insan Prima	60	Abu Raihan View 2	Koto Tangah	42	2018
119	PT. Sumatra Insan Prima	61	Abu Raihan View 3	Payolansek	45	2021
120	Salfiadi	62	Subarang Betung Cluster	Subarang Batuang	8	2018
121	PT. Jras Nofaren Prima	63	Griya Pantura II	Padang Tinggi Piliang	45	2020
122	Fadjrin Z	64	Iskandaria Residence	Koto Tangah	11	2021
123	Fadjrin Z	65	Gardenia Residence	Padang Tinggi Piliang	13	2021
124	PT. Bumi Andalas Jaya	66	Barokah Residence	Koto Tangah	15	2019
125	Zulka Hendra	67	Dzeko Residence	Koto Tangah	14	2019
126	PT. Anugrah Hijrah Bersama	68	Griya Hijrah Payolansek	Payolansek	6	2019
127	PT. Anugrah Hijrah Bersama	69	Talang Basamo Residence	Talang	16	2021
128	Rahmat Hidayat	70	Multazam Residence	Padangdata Tanahmati	7	2019
129	Rahmat Hidayat	71	Granada Residence	Koto Tangah	8	2021

NO	DEVELOPER	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI KELURAHAN	JUMLAH UNIT	TAHUN DIBANGUN
130	Edi Kusmana (Yayasan Al-Huffazh)	72	Daarun Samara	Subarang Batuang	6	2019
131	Nofriadi	73	Kampan Asri	Padangtongah Balai Nanduo	6	2015
132	Nofriadi	74	Taman Bonai Indah	Payolansek	6	2012
133	Ifdal	75	Talang Serumpun Indah	Talang	6	2014
134	Ridwan Sabirin	76	Perumahan Cluster Permai	Tanjung Pauh	9	2020
135	Edo Maulana	77	Asta Ibuh	Ibuh	8	2023
136	Fadjrin Z	78	Perumahan Ranah Muslim	Koto Tangah	11	2020
137	Fadjrin Z	79	Magnolla Residence	Padang Tinggi Piliang	22	2023
138	Andrius Adlis	80	Adena Townhouse	Padangtinggi Piliang	11	2023
Payakumbuh Utara						
139	Dt. Teddy	1	Griya Cubadak Air	Tigo Koto Diate	6	2011
140	Hendrisyah	2	Cikasimi	Tigo Koto Diate	75	2013
141	PT. Pembangunan Sumbar	3	Perumnas Nan Kodok	Tigo Koto Dibaruah	28	1980
142	Sisweri	4	Griya Hasanah Residence	Tigo Koto Diate	13	2017
143	Sisweri	5	Ranah Cubadak Aia	Tigo Koto Diate	6	2014
144	Zulka Hendra	6	Andalusia Residence Tahap I	Tigo Koto Diate	15	2015
145	Zulka Hendra	7	Andalusia Residence Tahap II	Tigo Koto Diate	13	2017
146	Zulka Hendra	8	Grand Zuri Residence	Kapalo Koto Dibalai	6	2015
147	Fadli Rasyid	9	Barokah Residence	Tigo Koto Diate	25	2016
148	PT. Jras Nofaren Prima	10	Griya Padang Kaduduak	Tigo Koto Diate	34	2019
149	PT. Jras Nofaren Prima	11	Mutiara Pantura	Tigo Koto Diate	50	2012
150	PT. Ekajaya Surya Gemilang	12	Grand Madina Regency	Balai Tonga Koto	26	2023
151	Rina ABS	13	Nuansa Mandiri Jaya	Tigo Koto Diate	20	2014
152	Nofriadi	14	Ibuh Permata Asri	Kotokociek Kubu Tapakrajo	33	2012
153	PT. Anugerah Hijrah Bersama	15	Cubadak Air Residence I	Tigo Koto Diate	35	2020
154	PT. Anugerah Hijrah Bersama	16	Cubadak AIr Residence II	Tigo Koto Diate	8	2023
155	PT. Nofaren Kemala Barokah	17	Grand Samara Residence	Tigo Koto Diate	19	2021
156	PT. Anugrah Hijrah Bersama	18	Nanko Residence	Tigo Koto Dibaruah	16	2021
157	Ifkar Delvando	19	Marsafira Residence	Napar	15	2021
158	PT. Sahati Indah Prima	20	Napar Indah	Napar	26	2023

NO	DEVELOPER	No. Urut	PERUMAHAN	LOKASI KELURAHAN	JUMLAH UNIT	TAHUN DIBANGUN
159	PT. Quarto Radix Mandiri	21	Balai Betung Residence	Ompang Tanah Sirah	12	2015
160	PT. Jras Nofaren Prima	22	Perumahan Pantura II	Kotokociek Kubu Tapakrajo	22	2020
Lamposi Tigo Nagori						
161	PT. Mandevilla	1	Edelweis	Padang Sikabu	92	2014
162	PT. Mandevilla	2	Gardenia	Koto Panjang Padang	102	2014
163	PT. Mandevilla	3	Jepara Asri	Koto Panjang Padang	89	2016
164	Wendra Yunaldi	4	Padang Aua Permai I	Padang Sikabu	20	2018
165	Wendra Yunaldi	5	Padang Aua Permai	Padang Sikabu	23	2017
166	Mardianis	6	Perumahan lampasi Permai	Parambahan	21	2015
167	PT. Benson Bumi Persada	7	Pady Regency	Parambahan	22	2019
168	Edo Maulana	8	Perumahan Padang Aur Permata	Padang Sikabu	6	2020
169	Dani Hardi	9	Green Garden Residence	Parik Muko Aia	6	2021
170	Ben	10	Griya Islam Padang Aua	Padang Sikabu	7	2020
171	PT. Sabanan Elok Sejahtera	11	Perumahan Islami Griya Tarok Padang Sikabu	Padang Sikabu	28	2023
172	PT. Sumatra Insan Prima	12	Abu Rehan View V	Padang Sikabu	32	2023
173	PT. Tuah Mega Jaya	13	Yahnul Residence	Koto Panjang Padang	70	2023
174	Edwar	14	Rosita Indah Parambahan	Parambahan	11	2019
			TOTAL		**6,087**	

Sumber: Hasil pendataan Tahun 2024

Dengan telah dilaksanakannya fasilitasi serah terima PSU Perumahan yang dibangun oleh pengembang kepada pemerintah Kota Payakumbuh sejak tahun 2019, terdapat 38 perumahan yang telah melakukan serah terima dengan rincian pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9

Tabel Rekapitulasi Data Perumahan Yang Telah Dilakukan Proses Serah Terima PSU Tahun 2019-2024

No	DEVELOPER	NAMA PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	LOKASI KELURAHAN	JUMLAH UNIT RENCANA	JUMLAH UNIT TERBANGUN	TAHUN DIBANGUN	STATUS ASET PERUMAHAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT. Irawati Palano Jaya	Irawati	Palano 4	Sawahpadang Auakuniang	28	28	2018	Sudah Serah Terima Tahun 2020	
2	PT. Irawati Palano Jaya	Irawati	Limbukan Indah/Palano 3	Limbukan	50	50	2017	Sudah Serah Terima Tahun 2020	
3	PT. Rapizon Insan Cipta	Irawati	Padang Karambia Sejahtera	Kototuo Limokampuang	59	59	2013	Sudah Serah Terima Tahun 2020	
4	Khairuddin Yusuf		Safir Residence	Kapalo Koto Ampangan	42	42	2015	Sudah Serah Terima Tahun 2019	
5	PT. Cahaya Amal Taqwa	Yuskar Alam	D' Talago Green View	Sawahpadang Auakuniang	109	109	2020	Sudah Serah Terima Tahun 2022	
6	PT. Mandevilla	Ronny Ramadhon	Kedoya Green Tiakar 1	Tiakar	56	56	2017	Sudah Serah Terima Tahun 2020	
7	PT. Mandevilla	Ronny Ramadhon	Kedoya Green Tiakar 2	Tiakar	77	77	2017	Sudah Serah Terima Tahun 2020	
8	PT. Mandevilla	Ronny Ramadhon	Kedoya Green Tiakar 3	Tiakar	50	50	2019	Sudah Serah Terima Tahun 2022	
9	PT. Jras Nofaren Prima	Asmel Arianto	Balai Nan Tuo Permai	Tiakar	54	54	2019	Sudah Serah Terima Tahun 2021	
10	PT. Jean Jaya Utama	Chendia Indra	Griya Jean Tiakar Islami	Tiakar	44	44	2021	Sudah Serah Terima Tahun 2023	
11	Patra Doma		Griya Tiakar Nan Indah	Payobasung	36	36	2010	Sudah Serah Terima Tahun 2021	
12	Eriyanto		Sicincin Permai	Sicincin	35	35	2011	Sudah Serah Terima Tahun 2020	
13	PT. Ekajaya Surya Gemilang	Eka Fahdani	Ekajaya Permata	Sicincin	23	23	2020	Sudah Serah Terima Tahun 2022	
14	PT. Ekajaya Surya Gemilang	Eka Fahdani	Cemara Ekajaya	Sicincin	26	26	2021	Sudah Serah Terima Tahun 2022	

No	DEVELOPER	NAMA PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	LOKASI KELURAHAN	JUMLAH UNIT RENCANA	JUMLAH UNIT TERBANGUN	TAHUN DIBANGUN	STATUS ASET PERUMAHAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	PT. Mandevilla	Ronny Ramadhon	Kedoya Green Tiakar 4	Tiakar	71	71	2023	Sudah Serah Terima Tahun 2024	
16	PT. Mandevilla	Ronny Ramadhon	Shavilla Tiakar	Tiakar	63	63	2019	Sudah Serah Terima Tahun 2024	
17	PT. Jras Nofaren Prima	Asmel Arianto	Villa Taman Barum Indah	Tiakar	267	267	2021	Sudah Serah Terima Tahun 2024	
18	Nof	Nofriadi	Griya Sicincin	Sicincin	54	54	2017	Sudah Serah Terima Tahun 2024	
19	PT. Irawati Palano Jaya	Irawati	Palano 1 Residence	Talang	20	20	2013	Sudah Serah Terima Tahun 2019	
20	PT. Ziko Eka Perdana	Rinaldi	Pulai Indah	Talang	50	50	2013	Sudah Serah Terima Tahun 2020	
21	PT. Irawati Palano Jaya	Irawati	Palano 2	Talang	53	53	2017	Sudah Serah Terima Tahun 2020	
22	PT. Mandevilla	Ronny Ramadhon	Univilla Regency	Talang	36	36	2019	Sudah Serah Terima Tahun 2021	
23	PT. Mandevilla	Ronny Ramadhon	Univilla Regency 2	Talang	33	33	2021	Sudah Serah Terima Tahun 2023	
24	PT. Ziko Eka Perdana	Rinaldi	Payolansek Indah 1	Payolansek	14	14	2015	Sudah Serah Terima Tahun 2020	
25	PT. Ziko Eka Perdana	Rinaldi	Payolansek Indah 2	Payolansek	11	11	2016	Sudah Serah Terima Tahun 2020	
26	Wendra Yunaldi	Wendra Yunaldi	Sahati Residence	Subarang Batuang	63	63	2013	Sudah Serah Terima Tahun 2023	
27	PT. Ziko Eka Perdana	Rinaldi	Bumi Muslim	Ibuh	13	13	2015	Sudah Serah Terima Tahun 2021	
28	Elfido Guska	Elsa / Elfido Gusra	Pido Asri I	Koto Tangah	36	36	2007	Sudah Serah Terima Tahun 2023	
29	PT. Sumatra Insan Prima	Beni Murdani	Abu Raihan View 2	Koto Tangah	42	42	2018	Sudah Serah Terima Tahun 2023	
30	PT. Jras Nofaren Prima	Asmel Arianto	Griya Pantura II	Padang Tinggi Piliang	45	45	2020	Sudah Serah Terima Tahun 2022	
31	H. Novitra	H. Novitra	Griya Asri	Pakan Sinayan	74	74	2006	Sudah Serah Terima Tahun 2023	

No	DEVELOPER	NAMA PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	LOKASI KELURAHAN	JUMLAH UNIT RENCANA	JUMLAH UNIT TERBANGUN	TAHUN DIBANGUN	STATUS ASET PERUMAHAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Hendrisyah	Hendrisyah/Lilis	Cikasimi	Tigo Koto Diate	75	75	2013	Sudah Serah Terima Tahun 2022	
33	Fadli Rasyid	Fadli Rasyid	Barokah Residence	Tigo Koto Diate	25	25	2016	Sudah Serah Terima Tahun 2021	
34	PT. Jras Nofaren Prima	Asmel Arianto	Griya Padang Kaduduak	Tigo Koto Diate	34	34	2019	Sudah Serah Terima Tahun 2021	
35	PT. Mandevilla	Ronny Ramadhon	Edelweis	Padang Sikabu	92	92	2014	Sudah Serah Terima Tahun 2019	
36	PT. Mandevilla	Ronny Ramadhon	Gardenia	Koto Panjang Padang	102	102	2014	Sudah Serah Terima Tahun 2019	
37	PT. Mandevilla	Ronny Ramadhon	Jepara Asri	Koto Panjang Padang	89	89	2016	Sudah Serah Terima Tahun 2019	
38	Nofriadi	Nofriadi	Taman Bonai Indah	Payolansek	6	6	2012	Sudah Serah Terima Tahun 2024	

Sumber: Hasil olahan data tahun 2024

2.1.4 Kinerja Anggaran

Untuk kinerja anggaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman ini selanjutnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Adapun perkembangan pertumbuhan anggaran dan realisasi sejak tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Tahun 2023-2025

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke n			Realisasi Anggaran pada Tahun ke n			Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-n			Rasio Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LIMBAH**	**3.114.342.352,00**	**4.049.442.520,00**	**7.473.816.958,00**	**3.015.169.702,00**	**3.830.714.763,00**		**96,82**	**94,60**		**1,40**	**0,27**
A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.114.342.352,00	4.049.442.520,00	7.473.816.958,00	3.015.169.702,00	3.830.714.763,00		96,82	94,60		1,40	0,27
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.065.534.078,00**	**4.320.377.742,00**	**4.395.328.674,00**	**3.718.654.613,00**	**3.973.919.688,00**		**91,47**	**91,98**		**0,08**	**0,07**
B	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.470.300,00	35.676.550,00	42.076.250,00	32.463.050,00	33.245.400,00		94,18	93,19		0,22	0,02
C	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.677.109.204,00	2.839.790.145,00	3.385.457.168,00	2.420.022.786,00	2.594.314.638,00		90,40	91,36		0,26	0,07

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke n			Realisasi Anggaran pada Tahun ke n			Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-n			Rasio Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.751.680,00		35.000.000,00	12.751.200,00			100,00			1,74	-1,00
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.674.950,00	472.002.000,00	261.341.580,00	432.153.600,00	434.689.997,00		88,07	92,09		-0,47	0,01
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	238.004.600,00	206.347.600,00		228.332.810,00	194.465.800,00		95,94	94,24		-1,00	-0,15
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.769.744,00	145.281.120,00	141.004.196,00	132.532.384,00	139.827.482,00		92,18	96,25		-0,02	0,06
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.753.600,00	621.280.327,00	530.449.480,00	460.398.783,00	577.376.371,00		98,22	92,93		0,13	0,25
III	**Program Pengembang Perumahan**	**626.975.160,00**	**521.875.780,00**	**524.087.860,00**	**328.170.842,00**	**308.422.400,00**		**52,34**	**59,10**		**-0,16**	**-0,06**
H	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	286.860.160,00	202.364.730,00	201.995.710,00	218.838.792,00	156.715.175,00		76,29	77,44		-0,30	-0,28

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke n			Realisasi Anggaran pada Tahun ke n			Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-n			Rasio Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	45.190.600,00	95.710.600,00	85.894.000,00	27.257.750,00	83.146.775,00		60,32	86,87		0,90	2,05
J	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	203.053.600,00	203.465.700,00	203.197.200,00	743.000,00	56.775.550,00		0,37	27,90		0,00	75,41
K	Pendistribusian dan serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	8.999.950,00	6.189.700,00	19.999.950,00	-	1.841.000,00		-	29,74		1,22	
L	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	82.870.850,00	14.145.050,00	13.001.000,00	81.331.300,00	9.943.900,00		98,14	70,30		-0,84	-0,88
IV	**Program Kawasan Permukiman**	**1.847.495.020,00**	**2.449.776.050,00**	**2.662.342.050,00**	**1.830.856.150,00**	**2.395.689.395,00**		**99,10**	**97,79**		**0,44**	**0,31**
M	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.847.495.020,00	2.449.776.050,00	2.662.342.050,00	1.830.856.150,00	2.395.689.395,00		99,10	97,79		0,44	0,31
V	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana**	**185.434.594,00**	**137.674.374,00**	**154.819.888,00**	**177.415.231,00**	**115.306.154,00**		**95,68**	**83,75**		**-0,17**	**-0,35**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke n			Realisasi Anggaran pada Tahun ke n			Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-n			Rasio Pertumbuhan	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan Utillitas Umum (PSU)											
N	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	185.434.594,00	137.674.374,00	154.819.888,00	177.415.231,00	115.306.154,00		95,68	83,75		-0,17	-0,35
	Total	**9.839.781.204,00**	**11.479.146.466,00**	**15.210.395.430,00**	**9.070.266.538,00**	**10.624.052.400,00**		**92,18**	**92,55**		**0,55**	**0,17**

Sumber: Hasil analisa tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat pertumbuhan anggaran setiap tahun yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh sebesar 55%. Sedangkan untuk realisasi anggaran juga dapat dilaksanakan dengan pertumbuhan realisasi sebesar 17% setiap tahun.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah meliputi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pengembang perumahan/developer, masyarakat terdampak bencana serta masyarakat yang belum memiliki tangki septik yang layak secara teknis. Kelompok yang terakhir ini seharusnya berlaku pada seluruh masyarakat yang belum memiliki tangki septik yang layak secara teknis, hal ini dikarenakan akan sangat pentingnya sebuah tangki septik individu yang layak secara teknis, disamping mendukung pencapaian akan akses aman, tangki septik yang layak secara teknis mencegah terjadinya pencemaran air tanah yang selama ini selalu disuarakan oleh pegiat lingkungan hidup dan kesehatan di Indonesia.

Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi kelompok sasaran layanan kinerja bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah dalam hal penerima manfaat untuk sasaran peningkatan rumah layak huni di Kota Payakumbuh. Dalam pelaksanaannya, penerima manfaat untuk sasaran peningkatan rumah layak huni ini adalah otomatis merupakan MBR dan memiliki rumah yang memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat peningkatan rumah layak huni yang layak secara administrasi dan teknis sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kelompok masyarakat yang terkena bencana juga merupakan kelompok sasaran layanan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kelompok masyarakat kategori ini adalah sesuai dengan amanat regulasi terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan, dimana terdapat 2 (dua) jenis pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu; a). Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dan b). Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi

Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kelompok pengembang perumahan/developer termasuk kelompok penerima layanan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam hal keberlanjutan/kesinambungan pengelolaan PSU perumahan dan permukiman. Keberlanjutan/kesinambungan pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman yang dibangun pengembang oleh pemerintah daerah harus terlebih dahulu dilakukan serah terima aset dari PSU dimaksud. Ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan terkait perumahan dan kawasan permukiman merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan tidak hanya menyangkut variable masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar.

Merujuk pada rancangan awal (Ranwal) RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2025-2029, terdapat beberapa item rumusan permasalahan yang ditampilkan bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu; a). Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), b). Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki pengelolahan air limbah domestik akses aman, c). Belum tertibnya penyerahan aset PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Dari rumusan permasalahan yang telah dituangkan dalam ranwal RPJMD tersebut selanjutnya yang selanjutnya menjadi perhatian bagi perangkat daerah sesuai dengan

Secara umum permasalahan pembangunan terkait perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sampai dengan kondisi 2024, masih terdapat ± 942 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kota Payakumbuh. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kota Payakumbuh kedepan untuk menghadirkan rumah dengan kategori rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (Rumah Layak Huni sesuai dengan penjelasan Pasal 24 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Selanjuntya dengan telah disyahkannya RPJMN 2025-2029 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 sebagai rujukan perencanaan nasional juga merumuskan adanya program strategis nasional Pembangunan 3 Juta rumah. Pembangunan 3 Juta Rumah sebagai salah satu program strategis nasional otomatis menjadi program prioritas bagi daerah untuk mewujudkannya. Sehingga kedepan, perlu dilakukan strategi dan kebijakan yang mendukung untuk pelaksanaan program ini.

2. Keterbatasan Basis Data Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman.

   Basis data sebagai barometer untuk menentukan kebijakan yang akan di ambil terkait dengan perumahan dan kawsan permukiman adalah mutlak untuk dilakukan pemutakhiran. Begitu juga terkait dengan basis data perumahan, juga perlu dilakukan updating data setiap tahun untuk menjadi dasar dalam penanganan terhadap peningkatan rumah layak huni di Kota Payakumbuh. Demikian juga halnya dengan basis data terkait dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman, perlu dilakukan updating data demi keberlangsungan pengelolaan PSU Permukiman kedepan.

3. Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.

   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada bagian kelima Pasal 8 ayat 3 mengamanatkan " Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait 2 (dua) jenis SPM Bidang Perumahan tersebut di atas, sudah seyogyanya Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengarahkan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya pemenuhannya di tahun-tahun mendatang.

4. Masih banyak PSU pada perumahan yang dibangun pengembang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamanatkan bahwa bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah. Sampai dengan kondisi akhir tahun 2024, baru terdapat 38 (tiga puluh delapan) perumahan yang dibangun oleh pengembang dari jumlah total 174 perumahan hasil pendataan tahun 2024 yang telah menyerahkan PSU Perumahannya kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. Ini diartikan bahwa baru terhadap 38 perumahan tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh dapat melakukan intervensi kesinambungan pengelolaan PSU Perumahannya dan masih terdapat ± 136 perumahan lagi yang mesti menyerahkan PSU Perumahan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. Serah terima PSU perumahan oleh pengembang kepada pemerintah daerah telah menjadi perhatian yang tinggi oleh pemerintah pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menjadikannya sebagai salah satu unsur *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK. Ini adalah program kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, serta memperkuat pengawasan internal.

5. Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terkait standar pelayanan bidang sanitasi (Air Limbah Domestik).

   Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebagai salah satu jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan kewenangannya menjadi tanggung jawab bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam pemenuhannya.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/atau komunitas yang dilayani" (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah bidang perumahan dan kawasan permukiman yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat menjadi isu yang penting untuk diperhatikan dan menjadi isu yang kritis/strategis. Perumusan isu-isu strategis yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh perlu memperhatikan beberapa hal antara lain adalah :

a. Pelimpahan urusan pemerintah bidang Perumahan Menjadi Urusan Daerah sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.
d. Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan.

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menjadikan tolok ukur bagi dokumen perencanaan di daerah. RPJMN ini merupakan mimpi presiden terpilih untuk masa waktu 5 tahun yang akan datang dan wajib didukung oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Adapun visi dan misi presiden republik indonesia yang dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 adalah dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.5
Tangkapan Layar Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia
Tahun 2025-2029

Dengan Visi " Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045" dengan 8 (delapan) Misi dan dikenal dengan Asta Cita. Selanjutnya Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia ini diterjemahkan kepada beberapa sasaran pembangunan prioritas nasional. Untuk sasaran pembangunan prioritas nasional 6, Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan

berkelanjutan menjadi salah satu indikator kinerja dengan rincian sebagaimana gambar tangkapan layar berikut:

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan				
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	65,25	67,00	74,00

Gambar 2.6
Tangkapan Layar Prioritas Pembangunan 6 RPJMN 2025-2029 terkait dengan hunian layak dan terjangkau

Dalam RPJMN 2025-2029 ini pula dirumuskan Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana rumusan ini dimunculkan untuk sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama. Perencanaan dan penyusunan Proyek Strategis Nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terdapat ± 77 item proyek strategis nasional yang telah ditetapkan dan yang terkait dengan urusan perumahan dan pemukiman adalah "***Pembangunan 3 Juta Rumah***". Rincian pembangunan 3 juta rumah sebagai salah satu proyek strategis nasional adalah dapat dilihat pada gambar tangkapan layar berikut:

Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025–2029*)

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
Perumahan dan Permukiman			
Baru			
75	Pembangunan 3 Juta Rumah	Nasional	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

Gambar 2.7
Tangkapan Layar Proyek Strategis Nasional Bidang Perumahan dan Permukiman pada RPJMN 2025-2029

Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk membangun tiga juta unit rumah dalam jangka waktu tertentu, dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini bertujuan mengurangi defisit perumahan (backlog), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun manfaat dari pelaksanaan program ini adalah diantaranya:

1. Akses ke hunian layak dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Meningkatkan stabilitas sosial dan mengurangi tingkat perpindahan penduduk
3. Mendukung pendidikan dan kesehatan dengan menyediakan lingkungan yang kondusif

Dalam pelaksanaannya nanti, program ini juga memiliki tanntangan yang cukup besar baik ditingkat pusat maupun daerah selaku pelaksana utama di antaranya:

1. Keterbatasan lahan, terutama di daerah perkotaan
2. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan rumah dalam jumlah besar
3. Proses perizinan yang lambat dan regulasi yang kompleks.

Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu :

a. Peningkatan Rumah Layak Huni (RLH) termasuk didalamnya upaya untuk mensukseskan progran strategis nasional “Pembangunan 3 Juta Rumah”.
b. Peningkatan rumah tangga yang melakukan pengolahan limbah domestik akses layak menjadi aman.
c. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Permukiman
d. Pencegahan kumuh pada kawasan permukiman

BAB III
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai oleh organisasi/OPD. Konsep Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sepenuhnya mengacu kepada tujuan pembangunan Kota Payakumbuh dalam RPD tahun 2023-2026 yang memprioritaskan prinsip pelaksanaan berkelanjutan. Sebagai kelanjutan tahap manajemen strategi sebelumnya dengan penetapan asumsi strategis, misi dan faktor kunci keberhasilan, dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dioperasionalisasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Adapun rumusan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh untuk 5 (lima) tahun yang akan datang (2025-2029) adalah meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak dan berkualitas dengan indikator Persentase rumah tangga dengan hunian yang layak dan permukiman yang berkualitas. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di rumuskan sebagai berikut; 1). Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni, 2). Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat, serta 3). Meningkatnya ketersediaan PSU perumahan yang berkelanjutan. Adapun rincian dari tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base Line 2024	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke (%)					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak dan berkualitas	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	1. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	97,41	97,94	98,04	98,48	98,91	99,34	99,76
			2. Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	2. Persentase Rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman	21,92	22,74	23,57	24,39	25,21	27,68	30,14
			3. Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan	3. Persentase PSU Perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola oleh pemerintah kota	21,84	24,71	27,59	30,46	33,33	36,21	39,08

Sumber: Hasil telaah Tahun 2025

3.2 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Secara lengkap strategi Dinas PKP Kota Payakumbuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kota
2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
4. Peningkatan Persentase Rumah tangga yang menempati hunian akses sanitasi (Air limbah domestik aman).
5. Peningkatan Pengelolaan PSU perumahan (fasilitasi penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dan intervensi pengelolaan)
6. Peningkatan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan parasarana sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat keampuan kecil

3.3 Arah Kebijakan

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kebijakan–kebijakan yang diambil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh meliputi:

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
7. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
8. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
9. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
10. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
11. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
12. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
13. Penyelenggaraan pengelolaan PSU Perumahan
14. Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak dan berkualitas	1. Meningkatnya Penyediaan rumah layak huni	1. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kota	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
			6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
			7. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
		2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
			2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	1. Peningkatan Persentase Rumah tangga yang menempati hunian akses sanitasi (Air limbah domestik aman)	1. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	3. Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan	1. Peningkatan Pengelolaan PSU perumahan (fasilitasi penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dan intervensi pengelolaan)	1. Penyelenggaraan pengelolaan PSU Perumahan
	4. Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasisfikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Peningkatan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan parasarana sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat keampuan kecil 2.	1. Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

BAB IV
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program/kegiatan OPD yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kota Payakumbuh yang berisi prioritas terpilih dan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan outcome dan output. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang gunakan adalah betul-betul mendukung ketercapaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025-2029, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Perumahan
   1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      a) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
      b) Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
      c) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
      d) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

e) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus

f) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota"

g) Sub Kegiatan Identifikasi PerumahandiLokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

h) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

2. KegiatanSosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

b) Sub Kegiatan Pembentukan dan PelatihanTim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator

c) Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan

d) Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

e) Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

f) Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan

g) Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

b) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

c) Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota

d) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

e) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
f) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
g) Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
h) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
i) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
j) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota
k) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
l) Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
m) Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
n) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah SusunUmumdan/atauRumah Khusus
   a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
   b) Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah SusunUmum dan/atau Rumah Khusus
   c) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus
   d) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah
   e) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

f) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik

g) Sub Kegiatan Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana

h) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama PemerintahDaerah dengan Badan Usaha (KPDBU Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

j) Sub Kegiatan Pembangunan /Pengembangan/pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

k) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan

l) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

m) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

II. Program Kawasan Permukiman

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanTerintegrasi Secara Elektronik

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

c) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

d) Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

e) Sub Kegiatan Penyusunan /Review/Legalisas iKebijakan Bidang PKP

f) Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh"

g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Peningkatan untuk Kualitas Permukiman Kumuh denganluasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha

h) Sub Kegiatan Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

i) Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi MasyarakatTerdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh

j) Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

k) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

a) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak

b) Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

c) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

d) Sub Kegiatan Pendataan dan Penyelenggaraan Permukiman Kumuh Verifikasi Kawasan

e) Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

f) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh

h) Sub KegiatanPembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

i) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

III. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub KegiatanPerbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

b) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

c) Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh

d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh

e) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

f) Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

g) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

IV. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
   a) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
   c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
   d) Sub Kegiatan Sosialisasi standar, prosedur,dan kriteria serah terima PSU
   e) Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
   f) Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum di Perumahan
   g) Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
   h) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
   i) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat

V. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
   1. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
      a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

VI. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
      a) Sub Kegiatan Optimalisasi SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
      b) Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

c) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyaraka
d) Sub Kegiatan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
e) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
f) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
g) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
h) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
i) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota
j) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman
k) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
l) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu
m) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
n) Sub KegiatanPenyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
o) Sub Kegiatan Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
p) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
q) Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
r) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

s) Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik(SPALD) Setempat

t) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

VII. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   f) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   h) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   i) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

j) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

k) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

l) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

   d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun teknik merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 adalah dapat dilihat pada kertas kerja dokumen ini.

4.2 Program, Kegiatan Sub Kegiatan serta pendanaan

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program(outcome) dan Kegiatan (out put)	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2025-2029														Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pendanaan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14			15	16	17
Meningkatnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	**Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman**		**21,92**	**22,74**		**23,57**	**1.760.883.240**	**24,39**	**5.940.000.000**	**25,21**	**3.087.000.000**	**27,68**	**3.241.350.000**	**30,14**	**3.403.417.500**	**30,14**	**17.432.650.740**	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman**			**3.75**		**7.50**	**1.760.883.240**	**11.25**	**5.940.000.000**	**15.00**	**3.087.000.000**	**26.25**	**3.241.350.000**	**37.50**	**3.403.417.500**	**37.50**	**17.432.650.740**	
		SubKegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					1000	499.972.740	1000	420.000.000	1000	441.000.000	1000	463.050.000	1000	486.202.500	1000	2.310.225.240	
		SubKegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara					1	83.910.900	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	1	603.910.900	
		SubKegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.					100	1.176.999.600	500	5.330.000.000	100	2.426.000.000	100	2.518.300.000	100	2.627.215.000	100	14.078.514.600	
		SubKegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang diusun					1	-	1	90.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	440.000.000	
	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	**Program Pengembangan Perumahan**	***Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kota***			**100%**	**646.669.930**	**100 %**	**472.621.325**	**100 %**	**1.390.038.946**	**100 %**	**13.024.796.300**	**100 %**	**11.757.197.225**	**100%**	**953.121.312**	**100 %**	**14.958.640.039**	
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	***Meningkatnya Ketersediaan Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***			**100,00%**	**319.498.580**	**100,00%**	**153.783.100**	**100,00%**	**353.407.444**	**100,00%**	**11.641.696.526**	**100,00%**	**393.127.551**	**100,00%**	**419.241.184**	**100,00%**	**12.961.255.805**	
		Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	*Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan*			1 Dokumen	22.129.800	1 Dokumen	7.101.200	1 Dokumen	27.037.500	1 Dokumen	11.294.326.835	1 Dokumen	28.389.375	1 Dokumen	36.266.100	5 Dokumen	11.393.121.010	
		Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	*Jumlah Peraturan dan Data Bidang Pembangunan Perumahan yang diterbitkan*			1 Dokumen	21.983.200	1 Dokumen	21.692.950	1 Dokumen	24.236.478	1 Dokumen	25.448.302	1 Dokumen	26.720.717	1 Dokumen	28.056.753	5 Dokumen	126.155.200	
		Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	*Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah*			1 Dokumen	21.345.300	1 Dokumen	19.110.650	1 Dokumen	34.125.000	1 Dokumen	35.831.250	1 Dokumen	37.622.813	1 Dokumen	39.503.953	5 Dokumen	166.193.666	
		Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus*			1 Dokumen	24.628.750	1 Dokumen	28.715.200	1 Dokumen	28.875.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	36.750.000	1 Dokumen	38.587.500	5 Dokumen	167.927.700	
		Sub Kegiatan Identifikasi PerumahandiLokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*JumlahDokumenDataRumahdi Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*			1 Dokumen	137.865.730	1 Dokumen	40.780.800	1 Dokumen	138.204.221	1 Dokumen	145.114.432	1 Dokumen	152.370.154	1 Dokumen	159.988.661	5 Dokumen	636.458.268	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi KorbanBencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi*			1 Dokumen	91.545.800	1 Dokumen	36.382.300	1 Dokumen	100.929.245	1 Dokumen	105.975.707	1 Dokumen	111.274.493	1 Dokumen	116.838.217	5 Dokumen	471.399.962	
		KegiatanSosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	***Meningkatya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait Persiapan pengadaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi kabuoaten/kota***			**100,00%**	**89.561.100**	**100,00%**	**68.658.775**	**100,00%**	**99.573.554**	**100,00%**	**104.552.232**	**100,00%**	**109.779.843**	**100,00%**	**115.268.835**	**100,00%**	**497.833.239**	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	*JumlahOrang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota*			50 orang	37.135.700	50 orang	28.527.875	50 orang	40.942.109	50 orang	42.989.214	50 orang	45.138.675	50 orang	47.395.609	250 orang	204.993.483	
		Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	*JumlahDokumenData Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan*			1 Dokumen	22.360.000	1 Dokumen	18.653.075	1 Dokumen	25.484.341	1 Dokumen	26.758.558	1 Dokumen	28.096.486	1 Dokumen	29.501.310	5 Dokumen	128.493.770	

		Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan PerumahanBarudanMekanisme Akses Pembiayaan Perumahan*			50 orang	30.065.400	50 orang	21.477.825	50 orang	33.147.104	50 orang	34.804.459	50 orang	36.544.682	50 orang	38.371.916	250 orang	164.345.987	
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	***Meningkatnya Persentase rumah korban bencana/relokasi program pemerintah yang ditingkatkan Kualitasnya***			**100,00%**	**203.465.200**	**100,00%**	**203.197.200**	**100,00%**	**875.862.903**	**100,00%**	**1.215.000.000**	**100,00%**	**11.188.272.167**	**100,00%**	**220.000.000**	**100,00%**	**1.063.197.200**	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi*			10 unit	203.465.200	10 unit	203.197.200	10 unit	210.000.000	10 unit	215.000.000	10 unit	215.000.000	10 unit	220.000.000	50 unit	1.063.197.200	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga bagi korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah*							10 rumah tangga	665.862.903	20 rumah tangga	1.000.000.000	15 rumah tangga	973.272.167					
		Sub Kegiatan Pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/kota	*Jumlah rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/kota*											1 unit	10.000.000.000					
		Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota	***Meningkatnya persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota***	-		**100,00%**	**19.999.950**	**100,00%**	**35.355.600**	**100,00%**	**22.049.945**	**100,00%**	**23.152.442**	**100,00%**	**24.310.064**	**100,00%**	**25.525.568**	**100,00%**	**130.393.619**	
		Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota*			1 Dokumen	19.999.950		35.355.600		22.049.945		23.152.442		24.310.064		25.525.568	5 Dokumen	130.393.619	
		Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	***Meningkatnya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus***													**100,00%**	**130.000.000**	**100,00%**	**130.000.000**	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	*Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun*													1 laporan	85.000.000	1 laporan	85.000.000	
		Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau rumah khusus	*Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus*													1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	45.000.000	
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	***Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Rumah Swadaya***			**100,00%**	**14.145.100**	**100,00%**	**11.626.650**	**100,00%**	**14.145.100**	**100,00%**	**14.145.100**	**100,00%**	**14.145.100**	**100,00%**	**14.145.100**	**100,00%**	**68.207.050**	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian PembangunandanPengembangan Perumahan*			1 laporan	14.145.100	1 laporan	11.626.650	1 laporan	14.145.100	1 laporan	14.145.100	1 laporan	14.145.100	1 laporan	14.145.100	5 Laporan	68.207.050	
		Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	***Mneingkatanya fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung***							**100,00%**	**25.000.000**	**100,00%**	**26.250.000**	**100,00%**	**27.562.500**	**100,00%**	**28.940.625**	**100,00%**	**107.753.125**	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)*							1 laporan	25.000.000	1 laporan	26.250.000	1 laporan	27.562.500	1 laporan	28.940.625	4 laporan	107.753.125	
		Program Kawasan Permukiman	***Persentase peningkatan RTLH untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha***						**2.551.114.800**	**100,00%**	**945.000.000**	**100,00%**	**992.250.000**	**100,00%**	**1.041.862.500**	**100,00%**	**1.093.955.625**	**100,00%**	**4.073.068.125**	
		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	***Persentase meningkatnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha***							**100,00%**	**945.000.000**	**100,00%**	**992.250.000**	**100,00%**	**1.041.862.500**	**100,00%**	**1.093.955.625**	**100,00%**	**4.073.068.125**	
		Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh*							1 laporan	150.000.000	1 laporan	157.500.000	1 laporan	165.375.000	1 laporan	173.643.750	4 laporan	646.518.750	
		Sub Kegiatan Penyusunan /Review/Legalisas iKebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi*							1 dokumen	600.000.000	1 dokumen	630.000.000	1 dokumen	661.500.000	1 dokumen	694.575.000	4 dokumen	2.586.075.000	
		Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh*							1 dokumen	345.000.000	1 dokumen	362.250.000	1 dokumen	380.362.500	1 dokumen	399.380.625	4 dokumen	1.486.993.125	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	***Persentase meningkatnya rumah layak huni dalam rangka peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha***			**7,43%**		**14,86%**	**2.551.114.800**											
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*			73 unit	2.549.215.950	70	2.518.540.125											

		Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	*Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU*			1 Dokumen	37.340.500	1 Dokumen	32.574.675											
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	***Persentase Rumah Layak Huni***			**97,94%**		**98,04%**	**-**	**98,48%**	**10.625.000.000**	**98,91%**	**11.156.250.000**	**99,34%**	**11.714.062.500**	**99,76%**	**11.736.145.473**	**99,76%**	**44.046.173.598**	
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase meningkatnya rumah layak huni dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota***			**7,43%**		**14,86%**	**-**	**22,29%**	**10.625.000.000**	**29,72%**	**11.156.250.000**	**37,15%**	**11.714.062.500**	**44,58%**	**11.736.145.473**	**44,58%**	**44.046.173.598**	
		Sub KegiatanPerbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki*					70 unit	-	200 unit	10.350.000.000	200 unit	10.867.500.000	200 unit	11.410.875.000	200 unit	11.417.798.598	350 unit	44.046.173.598	
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh*							5 unit	250.000.000	5 unit	250.000.000	5 unit	262.500.000	5 unit	275.625.000	20 unit	1.038.125.000	
		Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh*							1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	18.500.000	1 Dokumen	19.425.000	1 Dokumen	20.396.250	4 Dokumen	83.321.250	
		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru*									1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	11.025.000	4 Laporan	31.525.000	
		Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	*Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh*									50 orang	10.250.000	50 orang	10.762.500	50 orang	11.300.625	150 Orang	32.313.125	
	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Perumahan yang Berkelanjutan	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	***Persentase PSU perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola oleh pemerintah kota***		**21,84%**	**24,71%**		**27,59%**	**122.816.760**	**30,46%**	**3.192.000.000**	**33,33%**	**3.351.600.000**	**36,21%**	**3.519.180.000**	**39,08%**	**3.695.139.000**	**39,08%**	**13.880.735.760**	
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	***Persentase peningkatan PSU perumahan yang telah dikelola oleh pemerintah kota***			**2,87**		**5,75%**	**122.816.760**	**8,62%**	**3.192.000.000**	**11,49%**	**3.351.600.000**	**14,37%**	**3.519.180.000**	**17,24%**	**3.695.139.000**	**17,24%**	**13.880.735.760**	
		Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*					1 Dokumen	-	1 Dokumen	168.000.000	1 Dokumen	176.400.000	1 Dokumen	185.220.000	1 Dokumen	194.481.000	5 Dokumen	724.101.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian*					5 Lokasi	-	5 Lokasi	2.362.500.000	5 Lokasi	2.480.625.000	5 Lokasi	2.604.656.250	5 Lokasi	2.734.889.063	25 Lokasi	10.182.670.313	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum Perumahan*					1 Laporan	-	1 Laporan	15.750.000	1 Laporan	16.537.500	1 Laporan	17.364.375	1 Laporan	18.232.594	5 Laporan	67.884.469	
		Sub Kegiatan Sosialisasi standar, prosedur,dan kriteria serah terima PSU	*Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur,dan kriteria serah terima PSU*					10 Pengembang	-	10 Pengembang	21.000.000	10 Pengembang	22.050.000	10 Pengembang	23.152.500	10 Pengembang	24.310.125	50 Pengembang	90.512.625	
		Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan*					2 Lokasi	-	2 Lokasi	405.300.000	2 Lokasi	425.565.000	2 Lokasi	446.843.250	2 Lokasi	469.185.413	10 Lokasi	1.746.893.663	
		Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasionaldan Pemeliharaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum*					2 Lokasi	-	2 Lokasi	126.000.000	2 Lokasi	132.300.000	2 Lokasi	138.915.000	2 Lokasi	145.860.750	10 Lokasi	543.075.750	
		Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan*					1 Dokumen	-	1 Dokumen	34.125.000	1 Dokumen	35.831.250	1 Dokumen	37.622.813	1 Dokumen	39.503.953	5 Dokumen	147.083.016	
		Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	*Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang*					1 Laporan	122.816.760	1 Laporan	59.325.000	1 Laporan	62.291.250	1 Laporan	65.405.813	1 Laporan	68.676.103	5 Laporan	378.514.926	

		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,KLASIFIKASI,DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	***Persentase Pelayanan Sertifikasi Kualitfikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman***								**2,87%**	**200.000.000**	**5,74%**	**210.000.000**	**8,62%**	**220.500.000**	**8,62%**	**630.500.000**	
		Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	***Persentase pengembag yang di fasilitasi sertifikasi kualifikasi klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman***								**100%**	**200.000.000**	**100%**	**210.000.000**	**100%**	**220.500.000**	**100%**	**630.500.000**	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil*								1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	220.500.000	3 laporan	630.500.000	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas PKP***		**80 87**	**4.630.549.256**	**80 87**	**4.710.867.890**	**80 87**	**5.060.000.000**	**80 87**	**5.565.999.999**	**80 87**	**6.122.600.000**	**80 87**	**6.734.860.000**	**80 87**	**27.594.053.981**	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Capaian Program dan Kegiatan***		**90%**	**48.551.000**	**90%**	**32.874.350**	**90%**	**53.527.478**	**90%**	**56.203.851**	**90%**	**59.014.044**	**90%**	**74.500.000**	**90%**	**273.141.223**	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan OPD dan Dokumen Pelayanan Publik*		3 Dokumen	20.851.000	3 Dokumen	14.498.900	3 Dokumen	22.988.228	3 Dokumen	24.137.639	3 Dokumen	25.344.521	3 Dokumen	30.000.000	15 Dokumen	116.969.289	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD*		3 Dokumen	18.700.000	3 Dokumen	15.396.950	3 Dokumen	20.616.750	3 Dokumen	21.647.588	3 Dokumen	22.729.967	3 Dokumen	28.000.000	15 Dokumen	108.391.254	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	9.922.500	1 Laporan	10.418.624	1 Laporan	10.939.556	1 Laporan	16.500.000	5 Laporan	47.780.680	
		SubKegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1	1.489.250											
		SubKegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1	1.489.250											
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian Dinas PKP***		**100%**	**35.000.000**	**100%**	**34.350.200**	**100%**	**35.000.000**	**100%**	**37.000.000**	**100%**	**39.000.000**	**100%**	**45.000.000**	**100%**	**190.350.200**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		32 Orang	35.000.000	33 orang	34.350.200	35 orang	35.000.000	37 orang	37.000.000	39 orang	39.000.000	40 orang	45.000.000	184 Orang	190.350.200	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Keuangan terhadap Aliran Kas**		**95%**	**3.385.605.000**	**95%**	**3.773.095.488**	**95%**	**3.654.824.471**	**95%**	**3.831.815.695**	**95%**	**4.023.873.634**	**95%**	**4.248.639.848**		**19.532.249.136**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		32 Orang	3.188.605.000	33 orang	3.459.214.688	35 orang	3.437.631.971	37 orang	3.603.763.570	39 orang	3.784.418.903	40 orang	3.973.639.848	184 Orang	18.258.668.980	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*		1 Dokumen	197.000.000	1 Dokumen	313.880.800	1 Dokumen	217.192.500	1 Dokumen	228.052.125	1 Dokumen	239.454.731	1 Dokumen	275.000.000	5 Dokumen	1.273.580.156	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik**		**100%**	**433.939.580**	**100%**	**262.660.635**	**100%**	**445.550.000**	**100%**	**467.827.500**	**100%**	**491.218.875**	**100%**	**550.030.775**	**100%**	**2.215.798.535**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		1 Paket	8.990.000	1 Paket	6.746.450	1 Paket	9.450.000	1 Paket	9.922.500	1 Paket	10.418.625	1 Paket	15.500.000	5 Paket	52.037.575	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	-	1 Paket	10.500.000	1 Paket	11.025.000	1 Paket	11.576.250	1 Paket	13.500.000	5 Paket	46.601.250	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		1 Paket	45.195.000	1 Paket	27.825.885	1 Paket	42.000.000	1 Paket	44.100.000	1 Paket	46.305.000	1 Paket	50.500.000	5 Paket	210.730.885	

		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*			1 Paket	24.369.000	1 Paket	16.577.150	1 Paket	24.675.000	1 Paket	25.908.750	1 Paket	27.204.188	1 Paket	45.000.000	5 Paket	139.365.088	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*			2 Dokumen	4.343.500	2 Dokumen	4.015.000	2 Dokumen	4.200.000	2 Dokumen	4.410.000	2 Dokumen	4.630.500	2 Dokumen	4.862.025	10 Dokumen	22.117.525	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*			1 Laporan	5.988.080	1 Laporan	5.982.900	1 Laporan	4.725.000	1 Laporan	4.961.250	1 Laporan	5.209.313	1 Laporan	15.500.000	5 Laporan	36.378.463	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			1 Laporan	345.054.000	1 Laporan	200.024.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	367.500.000	1 Laporan	385.875.000	1 Laporan	405.168.750	5 Laporan	1.708.567.750	
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1	1.489.250											
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik**			**100%**	**56.000.000**	**100%**	**-**	**100%**	**65.000.000**	**100%**	**328.000.000**	**100%**	**500.000.000**	**100%**	**670.806.158**	**100%**	**968.000.000**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*													2 unit	595.806.158	2 unit		
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*							10 unit	65.000.000			10 unit	175.000.000			20 unit	240.000.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*			5 unit	56.000.000	2 Unit	-			3 unit	78.000.000			2 unit	75.000.000	5 unit	153.000.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*											1 unit	325.000.000			1 unit	325.000.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*									1 unit	250.000.000					1 unit	250.000.000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik**			**100%**	**141.004.196**	**100%**	**141.153.217**	**100%**	**155.457.126**	**100%**	**163.229.982**	**100%**	**187.223.714**	**100%**	**282.500.000**	**100%**	**929.564.039**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			1 laporan	55.305.116	1 laporan	54.636.937	1 laporan	60.973.890	1 laporan	64.022.585	1 laporan	67.223.714	1 laporan	87.500.000	5 laporan	334.357.125	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*			1 laporan	85.699.080	1 laporan	86.516.280	1 laporan	94.483.236	1 laporan	99.207.398	1 laporan	120.000.000	1 laporan	195.000.000	5 laporan	595.206.914	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik**			**100%**	**530.449.480**	**100%**	**466.734.000**	**100%**	**650.640.925**	**100%**	**681.922.971**	**100%**	**822.269.732**	**100%**	**863.383.219**	**100%**	**3.484.950.847**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*			1 unit	42.950.000	1 unit	39.190.000	1 unit	47.352.375	1 unit	49.719.994	1 unit	52.205.993	1 unit	54.816.293	5 unit	243.284.655	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*			27 unit	369.100.000	27 unit	364.700.000	27 unit	387.555.000	27 unit	406.932.750	27 unit	450.000.000	27 unit	500.000.000	135 unit	2.109.187.750	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*						-	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	25.000.000	50 unit	125.000.000	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*			30 unit	20.620.000	30 unit	16.520.000	30 unit	22.733.550	30 unit	23.870.228	30 unit	25.063.739	30 unit	26.316.926	150 unit	114.504.442	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*			1 unit	97.779.480	1 unit	46.324.000	1 unit	168.000.000	1 unit	176.400.000	1 unit	245.000.000	1 unit	257.250.000	5 unit	892.974.000	

4.3 Sub Kegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam melakasanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbu selaku perangkat daerah yang bertugas membantu Walikota untuk menangani urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki beberapa Sub Kegiatan Prioritas dengan rincian sesuai dengan tabel 4.2 beriku:

Tabel 4.2
Sub Kegiatan Prioritas Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Out Come	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. SubKegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 2. SubKegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 3. SubKegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat	

No	Program Prioritas	Out Come	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
			4. SubKegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	

No	Program Prioritas	Out Come	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
			Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2. Subkegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

Sumber: Hasil Telaah Tahun 2025

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur capaian dari sasaran yang ditetapkan untuk 1 (satu) periode Renstra yaitu tahun 2025-2029, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029 dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Kepala Dinas terkait penetapan IKU ini seperti pada rincian tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base Line 2024	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke (%)					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak dan berkualitas	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	1. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	97,41	97,94	98,04	98,48	98,91	99,34	99,76
			2. Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	2. Persentase Rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman	21,92	22,74	23,57	24,39	25,21	27,68	30,14
			3. Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan	3. Persentase PSU Perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola oleh pemerintah kota	21,84	24,71	27,59	30,46	33,33	36,21	39,08

Sumber: Hasil telaah tahun 2025

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan atau menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa indikator kinerja terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan rincian seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke (%)						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,58	2,38	2,19	2,05	1,81	1,62	1,43	
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	%	0	-	-	-	30	60	100	
4	Jumlah Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	15,90	15,98	16,06	16,14	16,23	16,31	16,39	

Sumber: Hasil Telaah Tahun 2025

4.6 Indikator Kinerja Lainnya

Indikator Kinerja Lainnya adalah indikator yang berfungsi untuk mengukur kinerja dari perangkat daerah dan tidak menjadi indikator kinerja daerah (IKD) ataupun indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja kunci. Adapun beberapa indikator kinerja lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Lainnya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke (%)						Ket
				2025	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***	***2030***	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Hunian Layak dan Terjangkau	%	81,04	82,73	85,37	88,01	90,65	94,93	95,93	
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	19,48	20,48	22,31	24,19	25,08	26,16	30,00	

Sumber: Hasil Telaah Tahun 2025

BAB V
Penutup

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman serta

terwujudnya kontinuitas pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan di Kota Payakumbuh.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Payakumbuh, September 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH

MARTA MINANDA, ST, MT
NIP. 197103031997011001

MANAJEMEN RESIKO

Penetapan Konteks Resiko Strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PENETAPAN KONTEKS RESIKO STRATEGIS			
MENINGKATNYA PENYEDIAAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK DAN BERKUALITAS			
Nama Unit Kerja	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Periode	:	Tahun 2025 - 2029	
Sasaran Strategis PD	:	1.1	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni
		1.2	Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat
		1.3	Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan
Indikator Kinerja Sasaran PD	:	1.1.a	Persentase Rumah Layak Huni
		1.2.a	Persentase Rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman
		1.3.a	Persentase PSU Perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola oleh pemerintah kota
Urusan Pemerintah Daerah	:	1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2. Urusan Pekerjaan Umum	
Program Pembangunan	:	1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 2.1 Program Pengembangan Perumahan 3.1 Program Kawasan Permukiman 4.1 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 5.1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 6.1 Program Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 7.1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

PENETAPAN KONTEKS RESIKO STRATEGIS		
Bidang Kerja Pelaksana	:	1. Sekretariat 2. Bidang Perumahan 3. Bidang PSU dan Kawasan Permukiman

Manajemen Resiko Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Tujuan Meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak dan berkualitas	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau								
Sasaran 1.1. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tidak berkurang dari tahun ke tahun (hanya sedikit mengalami	RPP: 1.1.	Kepala Dinas	Keterbatasan anggaran/penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah	Internal	C	Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH) dengan kuantitas masih tinggi	Perangkat Daerah

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
		pengurangan)							
		Penerima manfaat tidak tepat sasaran	RPP: 1.2.	Kepala Dinas	Usulan dari kelurahan tidak/kurang objektif	Ekternal	C	Penerima manfaat prioritas tidak tertangani	Masyarakat
					Updating data jumlah RTLH tidak maksimal	Internal	C	Penerima manfaat prioritas tidak tertangani	Masyarakat
		Pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni (peningkatan kualitas dan pembangunan baru) tidak maksimal	RPP: 1.3.	Kepala Dinas	Kurangnya partispasi/swadaya dari masyarakat (bantuan adalah bersifat stimulan)	Eksternal	C	Perbaikan rumah tidak layak huni tidak maksimal	Masyarakat
Sasaran 2.1 Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	Persentase Rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengolahan air limbah	RPP: 2.1	Kepala Dinas	Sarana pengolahan air limbah (berupa tangki septik) belum menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat	Eksternal	C	Kemungkinan terjadinya pencemaran air tanah	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
		yang layak secara teknis dan aman							
					Masyarakat masih mengharapkan bantuan pemerintah daerah dalam hal penyediaan sarana pengolahan air limbah	Eksternal	C	Air limbah yang dihasilkan oleh masyarakat masih ditampung pada sarana yang tidak layak secara teknis dan kesehatan	Masyarakat
					Katerbatasan anggaran/penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah	Internal	C	Bantuan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak besar	Perangkat Daerah
Sasaran 3.1 Meningkatnya Ketersediaan PSU	Persentase PSU Perumahan yang	Masih rendahnya PSU Perumahan	RPP: 3.1	Kepala Dinas	Belum semua perumahan yang dibangun pengembang yang	Eksternal	UC	Keberlanjutan pengelolaan PSU pada	Perangkat Daerah, Pemerintah

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C/UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Perumahan yang berkelanjutan	dibangun pengembang yang telah dikelola oleh pemerintah kota	yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik dalam bentuk intervensi pengelolaan maupun yang telah melakukan serah terima)			telah menyerahkan PSU-nya ke pemerintah Daerah			perumahan terkendala	, Masyarakat

Teknik Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

Visi	**Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif**		
Misi	**Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak dan berkualitas	1. Meningkatnya Penyediaan rumah layak huni	1. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kota	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
			6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
			7. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
		2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
			2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	1. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Visi	**Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif**		
Misi	**Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
	2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	1. Peningkatan Persentase Rumah tangga yang menempati hunian akses sanitasi (Air limbah domestik aman)	1. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3. Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan	1. Peningkatan Pengelolaan PSU perumahan (fasilitasi penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dan intervensi pengelolaan)	1. Penyelenggaraan pengelolaan PSU Perumahan
	4. Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasisfikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Peningkatan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan parasarana sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat keampuan kecil	1. Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

META DATA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH

No	Program/kegiatan	Outcome/sasaran/kinerja	nama indikator	Definisi	METADATA			
					Rumus	Interpretasi	Sumber Data	Frekuensi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah**	**Nilai IKM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur dari pemberian layanan kepada masyarakat oleh suatu instansi**	a. Penentuan bobot $bobot = \frac{1}{jumlah\ parameter}$ b. IRIM $IRIM = \frac{total\ nilai\ persepsi\ responden\ per\ parameter}{total\ parameter\ yang\ teruji} \times bobot$ c. IKM $IKM = IRIM \times 25$	Semakin tinggi nilai dari IKM pada suatu instansi menandakan adanya tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut dan sebaliknya yang dipotrasikan dengan tabel berikut : Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi | Kinerja Mutu Pelayanan | Mutu Pelayanan 1 | 1,00 – 1, 75 | 25,00 – 44,99 | D | Tidak Baik 2 | 1,76 – 2,50 | 45,00 – 70,60 | C | Kurang Baik 3 | 2,51 – 3, 25 | 70,61 – 88,30 | B | Baik 4 | 3, 26 – 4, 00 | 88, 31 – 100 | A | Sangat Baik	Survei kepuasan masyarakat	Semesteran dan Tahunan
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/100%**	**Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi**	**Tersedia dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab perangkat daerah secara berkala sesuai ketentuan peraturan yang berlaku**	$\%\ ketersediaan\ dok\ rencana\ (nilai\ 25) = \frac{Dokumen\ perencanaan,\ penganggaran\ dan\ evaluasi\ yang\ dimiliki\ (25)}{Jumlah\ dokumen\ perencanaan,\ penganggaran\ dan\ evaluasi\ yang\ harus\ dipenuhi\ (25)} \times 100\%$	**tersedia dokumen sebagai berikut : 1. RENSTRA, 2. RENJA, 3. PERUBAHAN RENSTRA, 4. PERUBAHAN RENJA 5. EVALUASI TW 1,2,3,4, 6. LKJIP 7. LKPD 8. IKM 9. RKA/DPA 10. PRKA/PDPA 11. DAFTAR DATA SETIAP URUSAN YANG ADA DI APLIKASI SIPD YANG DI TETAPKAN OLEH WALIKOTA YANG DI PROSES WALIDATA 12.DOKUMEN INOVASI**	**Perangkat Daerah**	**Triwulan, semester dan Tahunan**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mempedomani Kepmendagi						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/100%**	**Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu**	**Tersedia laporan keuangan perangkat daerah yang terdiri dari laporan harian, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan**	**a. % adm keu harian = jumlah laporan keuangan harian yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan harian yang seharusnya disiapkan) dikali 100% b. % adm keu bulanan = jumlah laporan keuangan bulanan yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan bulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100% c. % adm keu triwulan = jumlah laporan keuangan triwulan yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan triwulan yang seharusnya disiapkan) dikali 100% d. % adm keu semester = jumlah laporan keuangan semester yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan semester yang seharusnya disiapkan) dikali 100% e. % adm keu tahunan = jumlah laporan keuangan tahunan yang disiapkan PD/Jumlah laporan keuangan tahunan yang seharusnya disiapkan) dikali 100% bobot**	**tersedia laporan harian meliputi 1. Penatausahaan/Transaksi Keuangan oleh BP dan BPP 2. verifikasi SPJ Tersedia laporan bulanan meliputi 1. Laporan pembayaran gaji ASN 2. Laporan pembayaran TPP ASN 3. Laporan Pembayaran Honor pengelola keu 4. Laporan pembayaran BBM 5. Laporan pembayaran gaji outsourcing Tersedia laporan bulanan rutin lainnya 1. Laporan fungsional 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan DTH Pajak 4. Laporan ARIP dan BPJS 5. Laporan rekonsiliasi SMART Tersedia Laporan triwulan 1. Monev perben (BKU, BP Kas Umum, Rek Koran BP dan BPP, Kartu gaji perorangan) 2. Laporan hasil Rekon LRA Tersedia Laporan Semester 1. Laporan keu Semester 1 2. Laporan keuangan semester 2**	**Perangkat daerah**	**Harian, bulanan, triwulanan, semester, tahunan**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mempedomani Kepmendagi						
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/100%**	**Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Tersedia laporan kepegawaian perangkat daerah yang terdiri dari triwulanan, semesteran, dan tahunan**	**a. % adm kepegawaian bulanan = jumlah laporan kepegawaian bulanan yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian bulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100% b. % adm kepegawaian Triwulanan = jumlah laporan kepegawaian Triwulanan yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian Triwulanan yang seharusnya disiapkan) dikali 100% c. % adm kepegawaian Semester = jumlah laporan kepegawaian Semester yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian Semester yang seharusnya disiapkan) dikali 100% d. % adm kepegawaian Tahunan = jumlah laporan kepegawaian Tahunan yang disiapkan PD/Jumlah laporan Kepegawaian Tahunan yang seharusnya disiapkan) dikali 100% bobot a = 25 b = 20**	**tersedia laporan bulanan meliputi 1. Rekap Absensi ASN 2. Rekap Cuti 3. Rekap DL 4. Rekap Izin, Terlambat, cepat pulang, telat pulang 5. Rekap Lembur Tersedia laporan Triwulan meliputi 1. SKP ASN 2. Rekap SKP triwulanan Tersedia Laporan Semester 1. Laporan keu Semester 1 2. Laporan keuangan semester 2 3. Laporan KGB per semester 4. Laporan kenaikan Pangkat 5. Laporan Bezetting Tersedia laporan tahunan 1. Rekap SKP Final 2. Sasaran SKP 3. Rekap Pajak ASN pribadi per tahun**	**Perangkat daerah**	**Bulanan, triwulanan, semester, tahunan**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Mempedomani Kepmendagi						
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah/75%**	**Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah**	**Indeks layanan administrasi perangkat daerah**	**Indeks layanan administrasi PD merupakan tolok ukur dari pemberian layanan kepada ASN dilingkup PD ybs kuisioner layanan kepegawaian, keuangan, program, monev, layanan umum kantor**	a. Penentuan bobot $bobot = \frac{1}{jumlah\ parameter}$ b. SK ASN $SK\ ASN = \frac{total\ nilai\ persepsi\ responden\ per\ parameter}{total\ parameter\ yang\ teruji} \times bobot$ c. ILA PD $ILA\ PD = SK\ ASN \times 25$	Semakin tinggi nilai dari ILA PD (indeks layanan administrasi PD pada suatu instansi menandakan tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut dan sebaliknya yang Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi | Kinerja Mutu Pelayanan | Mutu Pelayanan 1 | 1,00 – 1, 75 | 25,00 – 44,99 | D | Tidak Baik 2 | 1,76 – 2,50 | 45,00 – 70,60 | C | Kurang Baik 3 | 2,51 – 3, 25 | 70,61 – 88,30 | B | Baik 4 | 3, 26 – 4, 00 | 88, 31 – 100 | A | Sangat Baik	**Survey kepuasan ASN**	**Semester dan tahunan**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mempedomani Kepmendagi						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							

5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah/80%**	**Meningkatnya kualitas pengada**	**Persentase ketersediaan BMD**	**Guna melaksanakan tugas dan fungsi PD menyiapkan BMD untuk menunjang urusan yang diampunya**	**Jumlah Aset yang tersedia dibagi dengan kondisi ideal**	**Semakin tinggi persentase maka kondidi PD ideal dalam bertugas**	**Perangkat daerah**	**Semester, tahunan**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mempedomani Kepmendagi						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Pengadaan Mebel							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/80%**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kewajiban PD memenuhi kebutuhan rutin untuk pembayaran jasa kantor seperti listrik, air, telp dan jasa umum lainnya**	**Pembayaran Rek Listrik air dan telepon selama 1 tahun pembayaran jasa outsourcing untuk tenaga kebersihan , keamanan dan sopir kantor**	**Semakin tinggi persentase maka kondidi PD ideal dalam bertugas**	**Perangkat daerah**	**Semester, tahunan**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mempedomani Kepmendagi						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan/80%**	**Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah**	**Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**	**Kewajiban PD memelihara secara rutin atas aset yang tercatat dalam Inventaris kantor**	**kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik, sedang, rusak dibagi total aset (kondisi baik berfungsi, biaya pengelolaan masih dicairkan)dikali 100%**	**Semakin tinggi persentase maka kondidi PD ideal dalam bertugas**	**Perangkat daerah**	**Semester, tahunan**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mempedomani Kepmendagi						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
II	**Program Pengembangan Perumahan**	**Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kota**	**Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kota**	**Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah**	**% penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kota = Jumlah penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan/Jumlah rumah korban bencana yang terdata**	**Semakin tinggi nilai persentase menandakan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang terdata semakin tuntas**	**Hasil pelaksanaan kegiatan**	**Tahunan**
1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data rehabilitasi rumah korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah	Persentase ketersediaan data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloaksi program kabupaten/kota	Data terkait dengan penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relaokasi program kabupaten/kota	Seluruh rumah korban bencana/terkena relokasi program pemerintah terdata dengan baik pada tahun berjalan sehingga memudahkan dalam pelaksanaan intervensi rehabilitasi	Semakin tinggi persentase maka kondisi penyediaan/rehabilitasi rumah korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah semakin meningkat dan valid sesuai dengan regulasi	Survey lapangan	Insidentil
2	KegiatanSosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait Persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	Persentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait Persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	Regulasi terkait peneyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau rellokasi program kabupaten/kota dapat tersosialisasikan dengan baik	Seluruh masyarakat yang terkena korban bencana sesuai dengan regulasi SPM bidang perumahan diberikan sosialisasi terkait regulasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi mereka	Semakin tinggi persentase masyarakat yang menerima sosialisasi terkait regulasi penyediaan rumah bagi korban bencana maka pelaksanaan kegiatan dilapangan akan semakin baik.	Survey lapangan dan pelaksanaan sosialisasi	Semestera dan Tahunan
3	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase rumah korban bencana/relokasi program pemerintah yang ditingkatkan Kualitasnya	Persentase rumah korban bencana/relokasi program pemerintah yang ditingkatkan Kualitasnya	Pembangunan/rehabiliatsi rumah korban bencana atau relokasi program kabuoaten/kota	% penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kota = Jumlah penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan/Jumlah rumah korban bencana pada tahun berjalan	Semakin tinggi nilai persentase menandakan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana tahun berjalan yang ditargetkan semakin tuntas	Kejadian dilapangan	Insidentil
4	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang telah di intervensi peningkatan kualitasnya	% Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota = Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang diintervensi peningkatan kualitasnya/data rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Semakin tinggi persentase menandakan bahwa distribusi peningkatan kualitas rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota semakin baik.	Pelaksanaan kegiatan	Tahunan
5	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Meningkatnya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Perentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya pembinaan pengelolaan terhadap rumah susun umum dan /atau rumah khusus	% Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus = Pembinaan yang dilakukan kepada sejumlah rumah susun umum dan atau rumah khusus dibandingkan dengan jumlah rumah susun umum dan atau rumah khusus yang ada	Semakin tinggi persentase menunjukkan pembinaan sudah merata	Pelaksanaan kegiatan	Semestaren dan tahunan
6	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Rumah Swadaya	Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya	Fasiliasti dalam pemberian rekomendasi PSU Perumahan yang dibangunan pengembagn sesuai dengan rencana tapak	Seluruh pengembang perumahan yang melakukan pengurusan izin baik itu KKPR maupun PBG harus memperoleh rekomendasi PSU Perumahan sesuai dengan regulasi yang ada	Semakin tinggi angka persentase menunjukkan semakin tinggi komitmen pengembang dalam menerapkan regulasi terkait rekomendasi PSU yang diberikan	Pelaksanaan kegiatan	Semestaren dan tahunan
7	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Meningkatnya fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung	Jumlah sertifikat kepemilikan bagunan gedung yang diterbitkan	Terlaksana fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	Jumlah sertfikat kepemilikan bagunan gedung yang diterbitkan	Semakin tinggi angka kepemilikan sertifikat bangunan gedung semakin tinggi legaliats kepemilikan gedung yang dimiliki oleh masyarakat	Pelaksanaan kegiatan	Semestaren dan tahunan
III	**Program Kawasan Permukiman**	**Meningkatnya pelaksanaan peningkatan RTLH untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase peningkatan RTLH untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terlaksananya penigkatan RTLH untuk peningkatan kuaitas kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase peningkatan RTLH untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha = Target pelaksanaan peningkatan RTLH dibandingkan dengan jumlah RTLH**	**Semakin besar persentase menunjukkan semakin besar RTLH yang ditingkatkan kualitasnya**	**Pelaksanaan kegiatan**	**Tahunan**
		Meningkatnya Rumah Layak Huni	**Persentase Rumah Layak Huni**	**Terlaksananya peningkatan kualitas RTLH**	**Persentase Rumah Layak Huni = Jumlah Rumah Layak Huni dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah**	**Semakin tinggi persentase rumah layak huni semakin kecil masyarakat yang memilki rumah dengan kuaitas rusak sedang dan berat**	**Pelaksanaan kegiatan**	**Tahunan**

1	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	meningkatnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase meningkatnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase meningkatnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha = Luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang dilakukan penataan dan peningkatannya dibandingkan dengan jumalah kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditetapkan	Semakin tinggi angka persentase menunjukkan semakin tinggi kawasan permukiman kumuh yang dilakukan penataan dan peningkatan kualitasnya	Pelaksanaan kegiatan	Tahunan
2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya rumah layak huni dalam rangka peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase meningkatnya rumah layak huni dalam rangka peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya peningkatan RTLH di kawasan permukiman kumuh untuk mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase meningkatnya rumah layak huni dalam rangka peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha = Jumlah peningkatan RTLH dibandingkan dengan jumlah RTLH yang terdata	Semakin besar persentase menunjukkan semakin besar RTLH yang ditingkatkan kualitasnya	Pelaksanaan kegiatan	Tahunan
IV	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Meningkatnya Rumah Layak huni**	**Persenstase Rumah Layak Huni**	**Terlaksananya peningkatan kualitas RTLH**	**Persentase Rumah Layak Huni = Jumlah Rumah Layak Huni dibandingkayan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah**	**Semakin tinggi persentase rumah layak huni semakin kecil masyarakat yang memiliki rumah dengan kualitas rusak sedang dan**	**Pelaksanaan kegiatan**	**Tahunan**
1	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya rumah layak huni dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan RTLH untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Terlaksananya peningkatan RTLH untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan RTLH untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh = Target pelaksanaan peningkatan RTLH dibandingkan dengan jumlah RTLH	Semakin besar persentase menunjukkan semakin besar RTLH yang ditingkatkan kualitasnya	Pelaksanaan kegiatan	Tahunan
V	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Meningktatnya Persentase PSU perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola oleh pemerintah kota**	**Persentase PSU perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola oleh pemerintah kota**	**terlaksananya pengelolaan oleh pemerintah daerah terhadap PSU perumahan yang dibangun pengembang baik dalam bentuk serah terima maupun intervensi peningkatan dari PSU perumahan tersebut**	**Persentase PSU perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola oleh pemerintah kota = PSU perumahan yang telah dikelola oleh pemerintah daerah bait dalam bentuk sudah diserahterimakan maupun telah diintervensi peningkatan dibandingkan dengan jumlah seluruh perumahan yang ada di Kota Payakumbuh**	**Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin tinggi kesinambungan pengelolaan PSU perumahan di Kota Payakumbuh oleh pemerintah daerah**	**Pelaksanaan kegiatan**	**Tahunan**
1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya PSU perumahan yang telah dikelola oleh pemerintah kota	Persentase peningkatan PSU perumahan yang telah dikelola oleh pemerintah kota	terlaksananya pengelolaan oleh pemerintah daerah terhadap PSU perumahan yang dibangun pengembang baik dalam bentuk serah terima maupun intervensi peningkatan dari PSU perumahan tersebut	Persentase peningkatan PSU perumahan yang telah dikelola oleh pemerintah kota = Jumlah peningkatan PSU perumahan yang dikelola dibandingkan dengan jumlah PSU perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin tinggi kesinambungan pengelolaan PSU perumahan di Kota Payakumbuh oleh pemerintah daerah	Pelaksanaan kegiatan	Tahunan
VI	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,KLASIFIKASI,DANREGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Meningknya Persentase Pelayanan Sertifikasi Kualitfikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman**	**Persentase Pelayanan Sertifikasi Kualitfikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman**	**Terlaksananya elayanan Sertifikasi Kualitfikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman**	**Jumkah Pelayanan Sertifikasi Kualitfikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman**	**Semakin tinggi angka Pelayanan Sertifikasi Kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman semakin baik kualitas pelaku usaha dibidang perumahan dan kawasan permukiman**	**Pelaksanaan kegiatan**	**Tahunan**
1	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Meningkatnya Persentase pengembag yang di fasilitasi sertifikasi kualifikasi klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase pengembag yang di fasilitasi sertifikasi kualifikasi klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah pelayanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Semakin besar angka Jumlah pelayanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang diberikan semakin meningkat kualitas pelaku usaha/badan hukium tersebut	**Pelaksanaan kegiatan**	**Tahunan**

POHON KINERJA
DINAS PERUMASAN RAKYAT dan KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH

Meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak dan berkualitas

IK :
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

S11. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni

IKU :
Persentase Rumah Layak Huni

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

IK :
Persentase peningkatan RTLH untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

Terlaksanaya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

IK :
Jumlah penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

Terlaksanaya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

IK :
Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Terlaksanaya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

IK :
Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kota

IK :
Persentase penyediaan rumah layak hun bagi korban bencana atau relokasi program kota

Terlaksanaya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

IK :
Jumlah Rumah KORban Bencana yang direhabilitasi/diperbaiki

Terlaksanaya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

IK :
Jumlah Rumah KORban Bencana yang direhabilitasi/diperbaiki

Terlaksanaya peningkatan Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait SPM Perumahan

IK :
Jumlah orang yang/kelanitiawan yang memahami regulasi terkait SPM Perumahan

Terlaksanaya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

IK :
Jumlah pendistribusian dan serah terima Rumah KORban Bencana yang direhabilitasi/diperbaiki

Terlaksanaya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

IK :
Jumlah orang/badan usaha yang dilakukan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus

Terlaksanaya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

IK :
Penurunan angka backlog

Terlaksanaya Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKG)

IK :
Jumlah penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

IK :
Persentase peningkatan RTLH untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

Terlaksanaya Pencegahan permukiman dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

IK :
Jumlah kawasan permukiman pada kabupaten/kota yang dicitaranmsi pencegahan terhadap kumuh

S12. Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat

IKU :
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengelolaan Air Limbah Aman Aman

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota

IK :
Persentase peningkatan rumah tangga yang memiliki pengelolaan air limbah aman aman

Terlaksanaya Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan

Terlaksanaya Jasa Pengedalian Lumpur tinja

Jumlah rumah tangga yang terlayani jasa pengedalian lumpur tinja

Terlaksanaya operasi dan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air limbah domestik (SPALD)

Jumlah sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara

Terlaksanaya penyediaan sub sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) setempat

Jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar

Terlaksanaya penyusunan rencana kebijakan strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)

Jumlah dokumen rencana kebijakan strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) yang disusun

S13. Meningkatnya Ketersediaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Perumahan yang Berkelanjutan

IKU :
Persentase PSU perumahan yang dilengun pengembang yang telah dilaksta oleh pemerintah kota

Meningkatnya pemyelenggaraan PSU perumahan

IK :
Persentase peningkatan PSU perumahan yang telah dilaksta oleh pemerintah kota

Terlaksanaya perencanaan penyediaan PSU perumahan

IK :
Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan yang diterbitkan

Terlaksanaya penyediaan prasarana sarana utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian

IK :
Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian

Terlaksanaya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan

IK :
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan

Terlaksanaya perbaikan prasarana sarana dan utilitas umum pemulihan fungsi hunian

IK :
Jumlah lokasi PSU perumahan yang dilaksanakan perbaikan

Terlaksanaya operasional dan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan

IK :
Jumlah lokasi pada perumahan yang dilaksanakan opersional dan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas umum

Terlaksanaya kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU perumahan

IK :
Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU perumahan

Terlaksanaya verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang

IK :
Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang

TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH) ± 2,70% atau ± 942 unit. 2. Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman telah mencapai angka 22,87%. 3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/kota yang ditangani adalah 0 %. 4. Jumlah perumahan yang telah melakukan serah terima PSU perumahan kepada pemerintah daerah adalah 38 unit perumahan dari 174 total perumahan yang ada.	1. Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 2. Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan. 3. Masih banyak PSU pada perumahan yang dibangun pengembang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah 4. Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terkait standar pelayanan bidang sanitasi (Air Limbah Domestik).	Permasalahan berdasarkan hasil konsultasi publik: - Penurunan Kualitas Air Permasalahan berdasrkan karakteristik wilayah - Belum semua rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Permasalahan berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Payakumbuh - Pengelolaan limbah cair	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): **Tujuan ke 1:** Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. **Tujuan ke 6:** Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. **Tujuan ke 11:** Menjadikan kota dan permukiman inklusif aman, tangguh dan berkelanjutan	**Asta Cita ke 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemmiskinan	**Misi ke 3 Propinsi Sumatera Barat:** Nagari/Desa sebagai basis kemajuan	1. Peningkatan Rumah Layak Huni (RLH) termasuk didalamnya upaya untuk mensukseskan progran strategis nasional "Pembangunan 3 Juta Rumah". 2. Peningkatan rumah tangga yang melakukan pengolahan limbah domestik akses layak menjadi aman. 3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Permukiman 4. Pencegahan kumuh pada kawasan permukiman

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		1. Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas (PSU) permukiman.	Penyelenggaraan pengelolaan PSU Perumahan	
2		2. Meningkatkan akses kepemilikan rumah dan hunian yang layak.	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 7. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) 8. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 9. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 10. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
3		3. Bantuan sanitasi dan peningkatan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
4		4. Pencegahan dan revitalisasi kawasan kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	**Meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak dan berkualitas**	**Meningkatnya kawasan pemukiman sehat**	**Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman**		**Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				meningkatnya rumah yang memenuhi pengolahan air limbah akses aman		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	SubKegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	SubKegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	SubKegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	SubKegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1.Meningkatnya kualitas pelayanan internal 2.Meningkatnya kualitas perencanaan	**Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai IKM**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
					Persentase Capaian Program dan Kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	SubKegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	SubKegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Persentase Realisasi Keuangan terhadap Aliran Kas	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SubKegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	**Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah**		**Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	
					Meningkatnya Ketersediaan Regulasi dan Data di Bidang Pembangunan Perumahan	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Meningkatya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait Penyelenggaraan Perumahan	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Subkegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
				Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Subkegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Subkegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
					Persentase rumah korban bencana/relokasi program pemerintah yang ditingkatkan Kualitasnya	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Subkegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Meningkatnya persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Subkegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Rumah Swadaya	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	
		Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	**Meningkatnya Rumah Layak huni**		**1.Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha** **2.Persentase Rumah Layak Huni**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	
					Persentase meningkatnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	SubKegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	SubKegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
					Persentase meningkatnya rumah layak huni dalam rangka peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
				Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
		Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni	**Meningkatnya Rumah Layak huni**		**Persentase Rumah Layak Huni**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	
					Persentase meningkatnya rumah layak huni dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Subkegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
				Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Subkegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Subkegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Subkegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
		Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan	**Meningkat penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan**		**Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Yang Dibangun Pengembang Yang Telah Dikelola Oleh Pemerintah Kota**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	
					Persentase peningkatan PSU perumahan yang telah dikelola oleh pemerintah kota	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
				Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
				Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
				Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
				Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
				Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
		Meningkatnya Ketersediaan PSU Perumahan yang berkelanjutan	**Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaaan Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan menengah**		**Persentase Pelayanan Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
					Persentase pengembag yang di fasilitasi sertifikasi kualifikasi klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	

Sumber: Hasil analisa tahun 2025